

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, serta potensi lokal yang dimiliki. Dalam konteks pembangunan nasional, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk aktualisasi kewenangan tersebut adalah melalui pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, termasuk pengembangan desa wisata.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia secara konsisten mendorong pengembangan desa wisata sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan. Hal ini tercermin dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang menempatkan desa wisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan desa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta memperkuat jati diri bangsa melalui pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.

Secara konseptual, desa wisata merupakan suatu integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang menyatu dengan kehidupan sosial serta tradisi masyarakat setempat (Yoeti, 2008). Pengembangan desa wisata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menekankan partisipasi aktif masyarakat melalui perencanaan partisipatif yang berkelanjutan secara sosial, budaya, dan lingkungan (Gunn & Var, 2002). Oleh karena itu, keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam praktiknya, pengembangan desa wisata tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah desa saja, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan. Konsep *collaborative governance* atau tata kelola kolaboratif menjadi pendekatan penting untuk memastikan partisipasi aktif dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun komunitas lokal. *Collaborative governance* adalah sebuah model pengendalian di mana salah satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan *stakeholders* non-state dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberative dan bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program publik atau aset publik (Ansel & Gash dalam Islamy, 2018:2). Proses kolaborasi merupakan suatu proses dimana di dalamnya terdapat suatu dialog yang memerlukan partisipasi untuk melakukan kepentingan yang akhirnya akan menghasilkan suatu keputusan yang disepakati bersama (Ansel & Gash, 2008).

Grey dalam Imron dan Anwar (2019: 5) mengatakan *collaborative* akan memberikan hasil yang positif capaian solusi untuk kepentingan seluruh *stakeholders* dilakukan dengan cara yang adil setiap *stakeholders* mempunyai kapasitas untuk dapat berpartisipasi secara detail dalam pengelolaannya. Febrian mengatakan *collaborative governance* berbasis pada tujuan untuk dapat memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak terkait, dan tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah tetapi juga masyarakat sipil (Febrian, 2016:203). *Collaborative governance* sendiri dibutuhkan dalam pariwisata dikarenakan dalam membangun pariwisata pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi tetap membutuhkan bagian-bagian lainnya dalam melakukannya

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* memiliki beberapa tahapan, antara lain: *face to face dialogue* (dialog tatap muka) yang mendorong komunikasi langsung antar-aktor, *trust building* (membangun kepercayaan) sebagai dasar hubungan kerja sama, *Commitment to Process* (komitmen terhadap proses) untuk memastikan setiap aktor berpartisipasi secara konsisten, *Shared Understanding* (pemahaman bersama) terhadap tujuan bersama, serta *Intermediate Outcomes* (hasil sementara) yang berfungsi memperkuat kepercayaan dan legitimasi kolaborasi.

Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata sangat penting karena sektor pariwisata desa merupakan bidang yang kompleks, penuh tantangan, melibatkan banyak pihak, serta memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya kolaborasi,

berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas lokal, dan akademisi dapat menggabungkan sumber daya, pengetahuan, serta jejaring mereka. Hal ini memungkinkan terciptanya solusi yang lebih komprehensif dan efektif dibandingkan dengan upaya yang dilakukan secara individual. Kolaborasi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata.

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata belum selalu berjalan optimal. Banyak desa wisata menghadapi persoalan rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antaraktor, konflik kepentingan, hingga ketergantungan yang tinggi pada pemerintah daerah. Meskipun forum kolaborasi telah dibentuk, aspek kepercayaan, komitmen terhadap proses, serta pemahaman bersama sering kali belum terbangun secara kuat dan berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan struktur kolaborasi belum tentu menjamin efektivitas kolaborasi itu sendiri. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Laily, Slamet, dan Sunariyanto (2025) yang menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan desa wisata masih menghadapi kendala pada aspek *trust building* dan konsistensi komitmen antaraktor.

Dengan kata lain, secara empiris masih banyak desa wisata yang belum mampu mewujudkan tata kelola kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana konfigurasi praktik kolaboratif yang benar-benar mampu menghasilkan transformasi desa wisata secara signifikan.

Dengan demikian, warga lokal memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam merancang strategi pariwisata, meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan, serta memperkuat rasa memiliki terhadap destinasi wisata yang mereka kelola. Selain itu, adanya kolaborasi membuka ruang pertukaran ide, inovasi, dan praktik terbaik dalam pengelolaan desa wisata, sehingga dapat melahirkan model pengembangan yang lebih kreatif, efisien, dan berkelanjutan.

Keberhasilan penerapan praktik kolaboratif dalam pengembangan desa wisata dapat dilihat pada Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, khususnya melalui program Wisata Noyo Gimbal View. Desa Bangsri merupakan contoh nyata bagaimana desa dengan keterbatasan potensi alam dan budaya mampu bertransformasi melalui inovasi dan kolaborasi. Pada tahun 2020, Desa Bangsri masih dikategorikan sebagai desa tertinggal dan miskin ekstrem (Marcelina, 2024). Namun, melalui strategi pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi, desa ini berhasil bertransformasi menjadi desa maju dan mandiri pada tahun 2025.

Gambar 1. 1 Wisata Noyogimbal Desa Wisata Bangsri



Sumber: radarkudus.jawapos.com

Di tengah berbagai tantangan yang dialami banyak desa wisata lain, keberhasilan Desa Wisata Bangsri menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji secara akademik. Jika banyak desa wisata mengalami kendala dalam membangun kolaborasi yang solid, mengapa Desa Wisata Bangsri justru mampu menunjukkan capaian yang relatif berhasil? Apakah keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh faktor konteks lokal semata, atau terdapat praktik-praktik kolaboratif tertentu yang secara sistematis mendukung transformasi desa tersebut?

Berbeda dengan banyak desa wisata lain yang mengandalkan keindahan alam seperti perbukitan, perairan, sungai, atau waduk, Desa Bangsri justru mengembangkan pariwisata berbasis perpaduan sejarah lokal, narasi budaya, wahana hiburan dan kuliner melalui konsep Noyo Gimbal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa keterbatasan potensi fisik tidak menjadi penghalang apabila desa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara kreatif dan kolaboratif. Capaian Desa Wisata Noyo Gimbal terlihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan. Pada hari biasa, jumlah pengunjung mencapai sekitar 2.000 orang per bulan, sementara pada hari libur dapat meningkat hingga 5.000–8.000 pengunjung per hari. Pada akhir tahun 2024 hingga awal 2025, rata-rata kunjungan wisatawan bahkan mencapai 14.000 orang per bulan.

Keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan dampak ekonomi yang dihasilkan, tetapi juga ditunjukkan melalui berbagai penghargaan dan pengakuan yang diperoleh pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Berbagai prestasi tersebut menjadi indikator bahwa pengembangan Desa Wisata Bangsri telah menunjukkan capaian

yang signifikan dan layak dijadikan contoh praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan desa wisata berbasis kolaborasi.

Berdasarkan berbagai sumber resmi pemerintah dan publikasi terkait, Desa Wisata Bangsri berhasil meraih berbagai prestasi penting. Pada tahun 2023, Desa Wisata Bangsri berhasil masuk dalam 15 Besar Nasional Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Prestasi tersebut sangat membanggakan mengingat kompetisi ini diikuti oleh lebih dari 2.007 desa wisata dari seluruh Indonesia. Keberhasilan menembus 15 besar nasional tersebut mengantarkan Desa Wisata Bangsri untuk mendapatkan penilaian lapangan secara langsung dari tim penilai Kementerian Desa. Hasil akhir penilaian menempatkan Desa Wisata Bangsri pada peringkat ke-13 tingkat nasional, sehingga menjadikannya salah satu desa wisata terbaik di Indonesia pada tahun 2023.

Gambar 1. 2 Penghargaan Desa Wisata Nasional



Sumber: Murianews.com

Prestasi Desa Wisata Bangsri tidak berhenti pada tingkat nasional. Pada tahun 2025, Desa Wisata Bangsri kembali memperoleh penghargaan berupa Juara Harapan I atau peringkat keempat dalam ajang Gelar Desa Wisata Jawa Tengah

Tahun 2025. Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan tercatat dalam Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Desa Wisata Bangsri mampu bersaing dengan berbagai desa wisata unggulan lainnya di tingkat provinsi.

Sebelumnya, pada tingkat daerah, Desa Wisata Bangsri juga berhasil meraih Juara Harapan III dalam Festival Desa Wisata Kabupaten Blora Tahun 2023. Bahkan berdasarkan keterangan Kepala Desa Bangsri, sebelum memperoleh berbagai penghargaan tersebut, Desa Bangsri pernah menempati peringkat keenam dalam lomba desa wisata tingkat Kabupaten Blora. Fakta ini menunjukkan adanya proses perkembangan yang bertahap dan berkelanjutan, di mana Desa Wisata Bangsri mampu meningkatkan kualitas pengelolaan wisata dari tingkat lokal hingga memperoleh pengakuan pada tingkat nasional.

Selain berbagai penghargaan formal tersebut, keberhasilan Desa Wisata Bangsri juga tercermin dari transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi di desa tersebut. Desa Bangsri yang sebelumnya dikenal sebagai desa dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah dan memiliki keterbatasan potensi ekonomi, berhasil bertransformasi menjadi desa wisata yang berkembang dan mampu menarik ratusan ribu wisatawan setiap tahunnya. Keberhasilan transformasi tersebut sering dijadikan contoh keberhasilan pembangunan desa berbasis potensi lokal oleh berbagai pihak. Perubahan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan

pembangunan sektor pariwisata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan tata kelola kolaboratif yang mampu menggerakkan sumber daya desa secara optimal.

Berbagai capaian yang diperoleh Desa Wisata Bangsri menunjukkan bahwa keberhasilannya tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh prestasi yang diraih pada berbagai tingkat kompetisi, dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat, serta kemampuan membangun kolaborasi antar stakeholder. Untuk memperjelas alasan Desa Wisata Bangsri dipilih sebagai objek penelitian best practices collaborative governance, berikut disajikan indikator-indikator keberhasilan yang menunjukkan posisi Desa Wisata Bangsri sebagai salah satu desa wisata unggulan di Kabupaten Blora.

Tabel 1. 1 Indikator Desa Wisata Bangsri sebagai Best Practice Collaborative Governance

No.	Indikator	Bukti Keberhasilan
1.	Prestasi Nasional	Masuk 15 Besar Nasional Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023 yang diselenggarakan Kementerian Desa PDTT dari 2.007 desa wisata peserta seluruh Indonesia.
2.	Prestasi Nasional	Meraih Peringkat 13 Nasional LDWN 2023, menjadikan Desa Wisata Bangsri sebagai salah satu desa wisata terbaik di Indonesia.
3.	Prestasi Provinsi	Meraih Juara Harapan I (Peringkat IV) Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025.
4.	Prestasi Kabupaten	Meraih Juara Harapan III Festival Desa Wisata Kabupaten Blora Tahun 2023.

5.	Prestasi Kabupaten	Pernah meraih Peringkat 6 Lomba Desa Wisata Tingkat Kabupaten Blora sebelum berkembang ke tingkat provinsi dan nasional.
6.	Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan mencapai 281.155 wisatawan pada Januari–Juli 2024.
7.	Kunjungan Wisata	Total kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 600.000 wisatawan sepanjang tahun 2024.
8.	Dampak Ekonomi	Mampu menyerap sekitar 40-100 tenaga kerja lokal dari masyarakat Desa Bangsri dan sekitarnya.
9.	Pengembangan UMKM	Terdapat 12 UMKM aktif di kawasan wisata dan 10 UMKM pendukung di sekitar kawasan wisata.
10.	Peningkatan Ekonomi Desa	Berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan wisata oleh BUMDes.
11.	Kolaborasi Stakeholder	Melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes Maju Mapan, Unit Wisata Noyo Gimbal View, masyarakat lokal, UMKM, investor, Pendamping Desa, Dinporabudpar Kabupaten Blora, serta stakeholder lainnya
12.	Keberlanjutan Pengelolaan	Pengembangan wisata berlangsung secara berkelanjutan melalui koordinasi rutin, musyawarah desa, evaluasi program, dan pembagian peran antar stakeholder.
13.	Transformasi Desa	Berhasil bertransformasi dari desa yang sebelumnya tergolong tertinggal menjadi desa wisata yang berkembang dan dikenal di tingkat nasional.

14.	Inovasi Pengelolaan	Mengembangkan wisata berbasis potensi lokal melalui Noyo Gimbal View dengan pengelolaan berbasis masyarakat dan BUMDes.
15.	Potensi Replikasi	Praktik kolaborasi yang diterapkan menunjukkan karakteristik <i>best practice</i> yang berpotensi direplikasi pada desa wisata lain di Kabupaten Blora maupun daerah lainnya.

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Bangsri, BUMDes Maju Mapan, Lomba Desa Wisata Nusantara 2023, Festival Desa Wisata Kabupaten Blora 2023, Gelar Desa Wisata Jawa Tengah 2025, serta hasil penelitian penulis (2025–2026).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya ditunjukkan oleh aspek pariwisata semata, tetapi juga mencakup aspek tata kelola kolaboratif, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pengakuan dari berbagai pihak. Berbagai capaian tersebut mengindikasikan bahwa terdapat praktik-praktik kolaboratif tertentu yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan desa wisata. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* berlangsung dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri, tetapi lebih jauh ingin mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*best practices*) yang menjadi faktor kunci keberhasilan pengembangan desa wisata tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan model *best practices collaborative governance* yang dapat dijadikan referensi dan direplikasi oleh desa wisata lainnya dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

Keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya ditunjukkan melalui berbagai prestasi yang diraih, tetapi juga melalui praktik-praktik kolaboratif yang

menjadi ciri khas pengelolaan desa wisata. Seperti pemerintah desa secara rutin menyelenggarakan forum musyawarah terbuka yang melibatkan masyarakat dan bahkan disiarkan secara langsung melalui media sosial sehingga meningkatkan transparansi serta partisipasi publik. Selain itu, pemerintah Desa Bangsri bersama Tim Maju Mapan secara konsisten menunjukkan komitmen dalam mengembangkan desa wisata melalui inisiatif mandiri untuk menjalin komunikasi dan melobi investor dalam pembangunan wahana wisata, *homestay*, kuliner, serta penyelenggaraan berbagai *event* budaya. Proses tersebut dilakukan tanpa ketergantungan pada intervensi pemerintah daerah, sehingga mencerminkan kapasitas aktor lokal dalam menggerakkan kolaborasi secara mandiri. Praktik ini menjadi salah satu keunggulan Desa Wisata Bangsri karena menunjukkan bahwa keberlanjutan kolaborasi dibangun atas dasar komitmen, kepemimpinan lokal, dan kemandirian para pemangku kepentingan, bukan semata-mata karena adanya bantuan dari pemerintah. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa Desa Wisata Bangsri memiliki karakteristik kolaborasi yang layak dikaji sebagai *best practices collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata.

Oleh karena itu, Desa Wisata Noyo Gimbal menjadi praktik terbaik (*best practice*) yang menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini tidak hanya menganalisis proses *collaborative governance* sebagaimana dilakukan dalam berbagai penelitian sebelumnya, tetapi juga berupaya mengidentifikasi dan merumuskan praktik-praktik terbaik (*Best Practices*) dari proses kolaborasi tersebut yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan Desa Wisata Bangsri.

Dengan mengkaji praktik terbaik tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis sebagai referensi bagi pengembangan desa wisata lain, khususnya desa-desa dengan keterbatasan potensi awal namun memiliki peluang besar untuk berkembang melalui tata kelola kolaboratif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Belum teridentifikasinya secara sistematis praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam penerapan *collaborative governance* pada pengembangan Desa Wisata Bangsri.
2. Belum diketahui faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri.
3. Belum tersedia model *best practices collaborative governance* yang dapat direplikasi pada desa wisata lain.
4. Belum diketahui sejauh mana praktik kolaborasi di Desa Wisata Bangsri mampu dipertahankan dalam menghadapi perubahan kebijakan dan kepemimpinan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri?
2. Apa saja *best practices collaborative governance* yang terbentuk dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora?
3. Bagaimana rekomendasi penguatan *best practices collaborative governance* Desa Wisata Bangsri yang dapat direplikasi pada desa wisata lain?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis *best practices collaborative governance* yang terbentuk dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora.
3. Untuk menyusun rekomendasi penguatan *best practices collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri Kabupaten Blora yang dapat direplikasi pada desa wisata lain.

1.5 Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut.

1.1.1 Kegunaan Akademis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, analitis, dan sistematis, serta kemampuan penulisan karya ilmiah bagi peneliti dengan berpedoman pada kajian teori dan metodologi yang diperoleh dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah akademik dan menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pendekatan *Best Practices* dan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik pada isu tata kelola kolaboratif dan pembangunan desa.
- 3) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong diskusi dan kajian akademik lanjutan mengenai praktik-praktik terbaik dalam *collaborative governance*, terutama dalam konteks pengembangan desa wisata. Analisis dan pembelajaran yang dihasilkan dapat memicu refleksi kritis serta pengembangan riset lanjutan di bidang Administrasi Publik.

1.1.2 Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam pengayaan

konsep dan penerapan *collaborative governance* melalui pendekatan *Best Practices* pada pengembangan desa wisata. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola kolaboratif.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman teoretis mengenai bagaimana praktik-praktik terbaik dalam *collaborative governance* dapat diidentifikasi, dianalisis, serta diadaptasi dalam konteks organisasi atau instansi lain, khususnya pada level pemerintahan desa dan komunitas lokal.

1.1.3 Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan rujukan praktis bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, serta pengelola desa wisata dalam mengoptimalkan penerapan *collaborative governance* berdasarkan praktik-praktik terbaik yang telah teruji di Desa Wisata Bangsri.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai pentingnya identifikasi, penerapan, dan keberlanjutan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan desa wisata berbasis kolaborasi.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi aplikatif dalam bentuk pembelajaran dan model adaptif pengembangan desa wisata berbasis *collaborative governance*, yang dapat dijadikan acuan

oleh desa lain atau organisasi/instansi terkait dalam mengembangkan pariwisata desa yang berkelanjutan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga akan menambah teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian tentang *Best Practices Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bangsri Di Kabupaten Blora tentu berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan. Berikut ini dijelaskan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian oleh **Laily, Slamet, dan Sunariyanto** (2025, Vol. 16, No. 2) dalam Jurnal Ilmu Administrasi berjudul *Collaborative Governance* dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kertosari bertujuan menganalisis efektivitas tata kelola pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan *collaborative governance*, peran *stakeholder*, serta strategi dan faktor pendukung keberhasilan. Penelitian kualitatif ini menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash, dengan hasil menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata Desa Kertosari berjalan efektif sesuai tahapan kolaborasi, mulai dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, hingga proses kolaborasi.

Kemudian, **Rasmadi Didik Aryadi** (2022, Vol. 7, No. 10) dalam *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* menganalisis pengembangan desa

wisata sebagai best practice penggunaan dana desa untuk mewujudkan good governance dan collaborative governance di Desa Rehtawu. Dengan pendekatan kualitatif dan teori good governance serta collaborative governance, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata memberikan dampak positif terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kedua penelitian di atas, menunjukkan hasil yang relatif efektif dan terstruktur, di mana tahapan collaborative governance menurut Chris Ansell dan Alison Gash berjalan sesuai model teoritis, mulai dari kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, hingga proses kolaboratif yang berdampak positif terhadap tata kelola dan good governance.

Sejalan dengan itu, penelitian oleh **Ni Putu Anik Prabawati dan Ni Wayan Supriliyani** (2023, Vol. 11, No. 2) dalam Jurnal Destinasi Pariwisata mengkaji pengembangan Desa Wisata Blahbatuh berbasis collaborative governance. Dengan indikator keberhasilan DeSeve dan proses kolaborasi Ansell dan Gash, penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah desa dengan sektor swasta dan masyarakat lokal, termasuk pembentukan Blahbatuh Tourism Board (BTB), berperan penting dalam penguatan pariwisata dan ekonomi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh **Hendrawan Prasetyo** (2023, Vol. 13, No. 1) dalam Public Administration Journal bertujuan menganalisis pengelolaan desa wisata berbasis collaborative governance di Kabupaten Kebumen. Dengan pendekatan kualitatif eksploratif, hasil penelitian

menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata sangat bergantung pada keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah desa, pokdarwis, serta sektor swasta yang dijalankan secara optimal.

Selanjutnya, penelitian oleh **Era Wijayati dkk.** (2022) dalam Jurnal Pariwisata dan Pengembangan Daerah menggambarkan jaringan aktor dalam pengembangan Desa Wisata Gogik. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan terbentuknya model *Quadruple Helix* yang melibatkan pemerintah, akademisi (Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang), masyarakat, dan media.

Selanjutnya, Penelitian oleh **Putu Devi dkk.** (2023, Vol. 49) dalam *Tourism Management Perspectives* mengeksplorasi strategi pengelolaan sumber daya pariwisata di dua desa wisata di Bali. Dengan analisis tematik kualitatif, temuan menekankan pentingnya keterlibatan adat dan masyarakat dalam menjaga kendali lokal atas sumber daya, yang memungkinkan terciptanya pengalaman ko-kreasi dan storytelling untuk mendukung konservasi. Penelitian di atas memperlihatkan bahwa keberhasilan pengembangan desa wisata sangat ditentukan oleh kemitraan multi-aktor, keterlibatan pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media, serta penguatan jaringan kolaboratif seperti model *Quadruple Helix* dan co-creation.

Namun demikian, sebagian besar penelitian lainnya menunjukkan bahwa *collaborative governance* belum berjalan secara optimal yang ditunjukkan oleh penelitian **Sri Wahyuni** (2025, Vol. 13, No. 1) dalam

Jurnal Kelitbangan membahas *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Rantau Langsung di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan pendekatan kualitatif dan teori Ansell dan Gash, penelitian ini menemukan bahwa meskipun dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen proses, dan pemahaman bersama telah dilakukan, kolaborasi masih menghadapi kendala serius pada aspek komunikasi, koordinasi antar-*stakeholder*, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya.

Penelitian selanjutnya, yang dilakukan oleh **Dino Alfian Nurdiansyah** (2024, Vol. 1, No. 3) dalam Jurnal PUBMEDIA Social Sciences and Humanities bertujuan mengkaji *collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. Menggunakan metode kualitatif dan teori Emerson serta Tina Nabatchi, hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* membentuk dinamika dan tindakan kolaboratif yang berdampak sosial dan ekonomi, meskipun pengembangannya belum maksimal akibat berbagai kendala struktural dan operasional.

Dalam penelitian **Rianandita 'Arsy Elkesaki, Retno Sunu Astuti, dan Dyah Lituhayu** (2025, Vol. 8, No. 1) dalam Jurnal Soshum Insentif membahas proses *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Ketenger. Dengan metode kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima indikator kolaborasi, aspek komitmen terhadap proses dan *Shared Understanding* belum optimal, sementara

indikator lainnya telah berjalan cukup baik dan berdampak pada kemajuan desa wisata.

Penelitian lainnya, Penelitian oleh **Moh. Nuh dkk.** (2024, Vol. 25, No. 199) dalam *Quality - Access to Success* mengkaji model *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemiren di kawasan Ijen Crater Geopark. Melalui studi kasus dengan wawancara dan FGD, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kondisi awal kolaborasi masyarakat masih rendah, intensitas kunjungan dan aktivitas wisata mendorong peningkatan pengetahuan dan keterlibatan masyarakat secara bertahap.

Penelitian selanjutnya oleh **Somsal Srisontisuk** (2023, Vol. 1, No. 9) dalam *Procedia of Multidisciplinary Research* menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Cokrodiningratan. Menggunakan teori Ansell dan Gash, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal kolaborasi telah berjalan baik, namun optimalisasi sumber daya manusia antar pihak masih perlu ditingkatkan.

Yuslinda Dwi Handini dkk. (2025) dalam *Jurnal of Tourism Universitas Udayana* bertujuan mengembangkan kerangka terpadu berbasis ko-kreasi untuk menjelaskan mobilisasi aset dalam proses branding destinasi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian mengidentifikasi tiga aset utama—alam, kelembagaan, dan sosial—yang digerakkan melalui kombinasi proses top-down dan *bottom-up*.

Penelitian oleh **Aninda Diah, Dyah Hariani, dan Susi Sulandari** (2021, Vol. 10, No. 3) dalam *Journal of Management & Public Policy* mengkaji *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul. Hasil penelitian menunjukkan banyak kendala seperti kekakuan aturan, lemahnya visi bersama, serta rendahnya komitmen dan partisipasi, meskipun terdapat faktor pendukung berupa kepercayaan, regulasi, dan pembagian peran.

Penelitian oleh **Silayar, Sartika, dan Mulyati** (2021, Vol. 6, No. 2) dalam *Jurnal Renaissance* menganalisis tata kelola pemerintahan kolaboratif di Kabupaten Kepulauan Sula. Menggunakan teori DeSeve, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kepercayaan antar-*stakeholder*, kelemahan masih terlihat pada struktur jaringan, komunikasi, serta kapasitas sumber daya manusia dan teknis.

Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Tongkotow, Waworundeng, dan Kimbal (2021, Vol. 11, No. 1) dalam *Jurnal Governance* mengkaji *collaborative governance* dalam pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. Dengan teori Ansell dan Gash serta analisis SWOT, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat tidak berjalan optimal akibat tidak terjalinnya kerja sama dengan PT. Newmont Minahasa Raya, sehingga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata menjadi rendah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola umum dari kelima belas penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan *collaborative*

governance dalam pengembangan desa wisata sangat bergantung pada kekuatan komitmen, kepemimpinan fasilitatif, kejelasan desain kelembagaan, serta konsistensi partisipasi antar pemangku kepentingan. Berikut rangkuman penelitian terdahulu dala tabel beri

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti , Tahun, dan Judul	Tujuan. Penelitian	Landasan Teori dan Metode	Hasil Penelitian
1.	Laily, Slamet, & Sunariyanto. 2025. Vol. 16, No. 2. <i>Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kertosari. Jurnal Ilmu Administrasi</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas tata kelola pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan <i>collaborative governance</i> , mendeskripsikan peran <i>stakeholder</i> , serta mengidentifikasi strategi dan faktor pendukung keberhasilannya	Teori <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash. Metode menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata Desa Kertosari telah berjalan efektif, mengikuti tahapan <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi.
2.	Sri Wahyuni. 2025. Vol. 13, No. 1. <i>Collaborative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata Rantau Langsat di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Kelitbangan</i>	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika kolaborasi antar <i>stakeholder</i> , serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kolaborasi dalam pengembangan desa wisata	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. menggunakan teori <i>collaborative</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses kolaborasi telah melibatkan dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahamanbersama, masih terdapat kendala signifikan dalam hal komunikasi, koordinasi antar <i>stakeholder</i> , partisipasi masyarakat yang rendah, serta keterbatasan sumber daya

			<i>governance</i> yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008).	
3.	Dino Alfian Nurdiansyah. 2024. Vol. 1, No. 3. <i>Collaborative governance</i> Pengembangan Pariwisata di Desa Sidomulyo Kabupaten Jember. <i>Jurnal PUBMEDIA Social Sciences and Humanities</i>	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui <i>collaborative governance</i> pengembangan pariwisata di Desa Sidomulyo.	Jenis penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah Emerson dan Tina Nabatchi.	<i>Collaborative governance</i> dapat membentuk dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi dan dampak terkait pengembangan pariwisata desa. <i>Collaborative governance</i> pengembangan pariwisata di Desa Sidomulyo menimbulkan dampak sosial dan ekonomi meskipun pengembangannya kurang maksimal karena terdapat beberapa kendala yang terjadi.
4.	Rasmadi Didik Aryadi. 2022. Vol. 7, No. 10. Analisis Pengembangan Desa Wisata sebagai Best Practice Penggunaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan desa wisata sebagai <i>best practice</i> penggunaan dana desa di Desa Rehtawu guna mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>collaborative governance</i> .	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini ingin mencari jawaban atas kesenjangan/ ketimpangan yang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata telah memberikan dampak positif dalam penerapan <i>good governance</i> dan <i>collaborative governance</i> .

	<i>Governance dan Collaborative governance. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia</i>		terjadi, dengan pendekatan teori good <i>governance</i> dan <i>collaborative governance</i> .	
5.	Ni Putu Anik Prabawati & Ni Wayann Supriyanti. 2023. Vol. 11, No. 2. Pengembangan Desa Wisata Berbasis <i>Collaborative governance</i> di Desa Blahbatuh Kabupaten Gianyar. <i>Jurnal Destinasi Pariwisata</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk <i>collaborative governance</i> dalam pengembangan desa wisata di Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.	Analisis data dilakukan dengan menggunakan ukuran keberhasilan kolaborasi yang dikembangkan oleh DeSeve serta indikator proses kolaborasi yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Blahbatuh telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat lokal, dalam pengembangan Desa Wisata Blahbatuh guna meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah pembentukan Blahbatuh Tourism Board (BTB), yaitu organisasi pengelola desa wisata berbasis masyarakat.
6.	Rianandita 'Arsy Elkesaki, Retno Sunu Astuti & Dyah Lituhayu. 2025. Vol. 8, No. 1. <i>Collaborative</i>	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan wisata di Desa Wisata Ketenger, dimana pemerintah berperan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Hasil penelitian memperlihatkan proses <i>Collaborative governance</i> yang mencakup 5 indikator masih belum terlaksana secara maksimal, khususnya pada aspek komitmen terhadap proses dan juga share understanding.

	<i>governance</i>: Proses Kolaborasi dalam Pengembangan Desa Wisata Ketenger Kabupaten Banyumas. <i>Jurnal Soshum Insentif</i>	menjadi pengontrol atas pengelolaan wisata, masyarakat berperan sebagai SDM, dan pihak swasta berperan menjadi pengelola wisata.	Namun, untuk indikator lainnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pola pemerintah dalam mengembangkan wilayah akan memberikan dampak pada kemajuan di Desa Wisata Ketenger.
7.	Hendrawan Prasetyo. 2023. Vol. 13, No. 1. <i>Management of Tourism Villages with Collaborative governance in Kebumen District. Public Administration Journal</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh para aktor dalam rangka pembangunan desa wisata di Kabupaten Kebumen guna mengembangkan pariwisata daerah.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pengelolaan desa wisata memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata, serta sektor swasta, dan dilaksanakan secara optimal.
8.	Moh. Nuh, Mukh. Kholid Mawardi, Rita & Yusri. 2024/ Vol. 25. No. 199. <i>Collaborative governance Model In Sustainable Village</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Model <i>Collaborative governance</i> dengan memperhatikan kearifan sosial serta pengembangan Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada komponen kondisi awal, tingkat pengetahuan dan kolaborasi masyarakat terkait pengembangan Geopark, khususnya di Desa Wisata Kemiren, masih tergolong rendah, namun mengalami peningkatan seiring dengan

	<i>Tourism Development (Case Study: Kemiren Village Tourism In Ijen Crater Geopark Cultural Site). Quality - Access to Success.</i>	agar menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan.	(FGD) terhadap 50 responden mengenai lima komponen Model <i>Collaborative governance</i>, yaitu: (1) Kondisi Awal (<i>Starting Conditions</i>), (2) Kepemimpinan Fasilitatif (<i>Facilitative Leadership</i>), (3) Desain Kelembagaan (Institutional Design), (4) Proses Kolaboratif (Collaborative Process), dan (5) Hasil (Outcomes).	meningkatkan intensitas kunjungan dan aktivitas wisata di desa tersebut.
9.	Putu Devi, Karine Dupre, Ying Wang, I Nyoman Darman, Xin Jin. 2023. Vol. 49. <i>Rural tourism resource management strategies: A case study</i>	Penelitian ini mengeksplorasi strategi pengelolaan sumber daya di dua desa di Bali, serta memberikan wawasan baru dan perbandingan dalam konteks adat yang tinggi	Data dikumpulkan melalui berbagai metode kualitatif dan dianalisis	Temuan penelitian mendukung pentingnya keterlibatan adat dan masyarakat dalam mempertahankan kendali lokal atas sumber daya, yang secara kolektif memungkinkan pemanfaatan infrastruktur dan tenaga kerja secara efektif. Hal ini memungkinkan

	<i>of two tourism villages in Bali. Tourism Management Perspectives</i>	namun masih kurang terwakili dalam kajian.	menggunakan analisis tematik.	terciptanya pengalaman bersama (co-creative experience-making) dan penceritaan (storytelling) yang mendukung konservasi sumber daya.
10.	Somsal Srisontisuk. 2023. Vol. 1, No. 9. <i>Collaborative governance For Rural Development: An Analysis Of Tourism Village In Indonesia (Case Study: Code Cokrodiningratan Village). Procedia of Multidisciplinary Research</i>	Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana pemerintah secara kolaboratif menerapkan tata kelola (<i>governance</i>) secara efektif dalam pengembangan Desa Wisata.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan memanfaatkan sumber data sekunder dan primer. Teori yang digunakan yaitu Teori <i>Collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash.	Hasil penelitian mengungkap beberapa temuan penting. kondisi awal yang telah ditetapkan oleh para pihak yang berkolaborasi pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam memaksimalkan indikator sumber daya manusia di antara seluruh pihak yang terlibat.
11.	Yuslinda Dwi Handini, dkk. 2025. Namun demikian, masih terdapat aspek yang perlu	Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan kerangka terpadu berbasis ko-kreasi untuk menjelaskan bagaimana aset	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui	Temuan penelitian mengungkapkan tiga aset kunci, yaitu aset alam, kelembagaan, dan sosial, yang digerakkan melalui proses top-down (kebijakan berjerjang) dan bottom-up

	ditingkatkan, khususnya dalam memaksimalkan indikator sumber daya manusia di antara seluruh pihak yang terlibat. <i>Journal of Tourism Universitas Udayana</i>	dimobilisasi melalui proses branding guna mencapai hasil ekonomi dan identitas destinasi.	observasi, dokumentasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD).	(partisipasi masyarakat serta slogan “Come–Feel–Enjoy–Stay”).
12.	Aninda Diah, Dyah Hariani, Susi Sulandari. 2021. Vol. 10, No. 3. <i>Collaborative governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. <i>Journal of Management & Public Policy</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis <i>collaborative governance</i> serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilannya dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>collaborative governance</i> masih menghadapi banyak kendala. Hal ini dibuktikan melalui analisis model <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash, antara lain: kekakuan aturan, pemahaman terhadap visi dan misi bersama yang belum optimal, serta kurangnya komitmen dan partisipasi. Faktor-faktor pendukung keberhasilan meliputi: adanya kepercayaan yang kuat, keberadaan regulasi, pembagian tanggung jawab, berbagi informasi, dan ketersediaan sumber daya. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi, yaitu

				struktur jaringan, komitmen, dan kejelasan tata kelola.
13.	Era Wijayati, Tri Yuniningsih, Titik Djumiarti. 2022. Jaringan Aktor dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Jurnal Pariwisata dan Pengembangan Daerah	Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Gogik.	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Gogik adalah Model <i>Quadruple Helix</i> dengan terdiri dari 4 aktor yakni pemerintah (Dinas Pariwisata, Dispermasdes, Pemerintah Desa Gogik, PLN, dan DLH), akademisi (UNDIP dan UNNES), masyarakat (Pokdarwis, BUMDes, PKK, dan Kelompok Tani), dan media (Jawa Pos Radar Semarang dan Instagram Desa Wisata Gogik).
14.	Silayar. Sartika & Mulyati. 2021. Vol. 6, No. 2. Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten	Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam pengembangan pariwisata di Kepulauan Sula.	Teori yang digunakan yaitu teori Edward DeSeve tentang faktor keberhasilan dalam <i>collaborative governance</i> .	Instrumen dalam penelitian ini yaitu 8 dimensi dalam <i>collaborative governance</i> yang menunjukkan bahwa struktur jaringan tidak terbentuk hierarki, masih kurangnya penelitian yang diberikan pemerintah, adanya kepercayaan dari masing-masing <i>stakeholders</i> , belum

	Kepulauan Sula. Jurnal Renaissance		Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	tergambang secara jelas siapa yang bukan <i>stakeholders</i> , masih sulitnya komunikasi yang terbentuk antar <i>stakeholders</i> , laporan pertanggung jawaban setiap <i>stakeholders</i> berbeda-beda, membagi informasi yang banyak dan sumber daya manusia dan teknis yang lemah.
15.	Tongkotow. Waworundeng & Kimbal. 2021. Vol. 11, No. 1. <i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok. Jurnal <i>Governance</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui <i>Collaborative governance</i> dalam Pengelolaan Wisata Pantai Lakban di Kecamatan Ratatotok.	Penelitian ini menggunakan 2 teori utama yaitu <i>collaborative governance</i> menurut Ansell dan Gash dan teori SWOT. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini karena pemerintah setempat dengan PT. Newmont Minahasa Raya tidak melakukan kerjasama yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak aktif dalam mengelola wisata tersebut.

Sumber: (Data diolah Peneliti, 2025)

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata, sebagian besar masih berfokus pada analisis proses kolaborasi dan tingkat efektivitas implementasinya berdasarkan indikator teoritis, seperti model Ansell dan Gash (2008) maupun Emerson dan Nabatchi (2012). Kajian-kajian tersebut umumnya menilai sejauh mana tahapan kolaborasi berjalan optimal serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi antaraktor, dan kurangnya komitmen dalam proses kolaboratif. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berhenti pada evaluasi deskriptif dan belum secara sistematis merumuskan konfigurasi praktik konkret yang dapat dikategorikan sebagai *Best Practices*.

Di sisi lain, studi yang secara eksplisit menggunakan pendekatan *Best Practices* dalam konteks desa wisata masih terbatas dan lebih banyak menitikberatkan pada aspek tata kelola umum, seperti transparansi atau pengelolaan keuangan desa, bukan pada pemetaan praktik kolaboratif yang dapat direplikasi sebagai model. Selain itu, penelitian terdahulu juga lebih banyak dilakukan pada desa wisata yang masih menghadapi berbagai kendala kolaborasi, sementara kajian terhadap desa wisata yang relatif berhasil dan memperoleh pengakuan nasional masih jarang dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi praktik kunci keberhasilannya.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian pada dua aspek utama. Pertama, belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan

pendekatan *Best Practices* dengan kerangka analitis *collaborative governance* untuk menghasilkan rumusan praktik kolaboratif yang konkret, terstruktur, dan berpotensi direplikasi. Kedua, masih terbatas penelitian yang menganalisis keberhasilan desa wisata berbasis kolaborasi secara integratif dengan mengaitkan proses kolaboratif, faktor pendukung–penghambat, serta potensi adaptabilitas model dalam konteks yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan tidak hanya menganalisis proses *collaborative governance* saja, tetapi juga mengidentifikasi dan merumuskan praktik-praktik terbaik dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri sebagai model tata kelola kolaboratif berbasis konteks lokal. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan konsep *Best Practices* dalam *collaborative governance* yang bersifat kontekstual, aplikatif, dan memiliki potensi untuk direplikasi pada pengembangan desa wisata lainnya.

1.1.5 Kajian Teori

1.1.5.1 Administrasi Publik

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:3) adalah proses mengorganisir sumber daya alam *personel public* dalam manajemen berbagai keputusan pada kebijakan publik. Administrasi publik dikatakan sebagai seni dan ilmu dalam mengatur hubungan publik. Administrasi publik menurut McCurdy dalam Keban (2014:3) merupakan suatu proses dalam perihal politik yakni sebagai salah satu cara dalam

memberikan instruksi dalam suatu negara dan juga dianggap sebagai sebuah cara yang sesuai dengan prinsip negara dalam melaksanakan fungsi negara. Administrasi publik memiliki tujuan dalam memecahkan permasalahan yang ada pada lingkup publik dengan menggunakan perbaikan atau penyempurnaan terutama dalam suatu organisasi. Hal tersebut justru dapat dikatakan bahwa administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari perihal politik.

Administrasi publik menurut Keban (2014:4-5) dikatakan sebagai *administration of public*, *administration for public*, dan *administration by public*. Istilah *administration of public* menjelaskan terkait peranan pemerintah sebagai penguasa dan regulator dalam proses pemerintahan dalam mengatur dan mengambil langkah yang tepat. Istilah dari *administration for public* adalah menjelaskan hal yang lebih baik dari penjelasan sebelumnya yakni pemerintah mengemban misi dalam memberikan pelayanan publik terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Istilah terakhir yaitu dimaknai sebagai konsep yang berorientasi dalam pemberdayaan masyarakat dengan menekankan kepada keaktifan dan kemandirian dari masyarakat atau lebih mengarah kepada *empowerment* yakni pemerintah bertugas sebagai fasilitator.

Cakupan atau ruang lingkup dalam administrasi publik menjadi sangat kompleks, tergantung pada perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Chandler dan Plano (Keban, 2008) menyatakan bahwa seiring kompleksitas kehidupan manusia, tugas yang

diemban oleh pemerintah atau administrasi publik pun semakin rumit. Salah satu cara untuk memahami cakupan praktis administrasi publik suatu negara adalah dengan memahami jenis-jenis lembaga, baik departemen maupun non-departemen, yang ada.

Dalam konteks Desa Wisata Bangsri, pemahaman ini penting karena pengembangan desa wisata bukan hanya urusan pemerintah desa semata, melainkan melibatkan masyarakat, pengelola desa wisata (Pokdarwis/BUMDes), serta pihak eksternal lain. Administrasi publik menjadi landasan konseptual yang menjelaskan mengapa keterlibatan multiaktor diperlukan agar program desa wisata berjalan efektif.

1.1.5.2 Paradigma Administrasi Publik

Berdasarkan pendapat dari Nicholas Henry dalam Keban (2014: 31-33) paradigma dalam administrasi negara terdapat enam macam dengan periode yang berbeda sebagai berikut:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Periode pertama dari perkembangan administrasi negara ditandai dengan publikasi salah satu buku dari tokoh terkenal pada masa tersebut yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Paradigma ini menjelaskan bahwa administrasi negara harus berfokus pada birokrasi pemerintahan yang mana politik harus berpusat pada perhatian kebijakan dari kehendak rakyat. Dikotomi politik dan administrasi dibuktikan dengan adanya pemisahan badan legislatif yang bertugas sebagai perwakilan dari suara rakyat, badan eksekutif bertugas sebagai

badan pelaksana dari suara rakyat, serta yudikatif dan legislatif bertugas dalam menentukan tujuan dan perumusan kebijakan.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma pada masa ini berfokus pada Principles of Public Management yang ditulis oleh W.F. Willoughby. Pengelolaan administrasi pada masa ini terdapat kontribusi dari bidang lain mulai dari industri dan manajemen. Bidang tersebut memberikan dampak dalam perkembangan prinsip-prinsip administrasi publik. Prinsip tersebut menjadi fokus dari penelitian administrasi publik, tetapi lokus yang kurang ditekankan. Hal tersebut dikarenakan prinsip-prinsip administrasi publik dapat muncul dalam lingkungan, kerangka kerja, kelembagaan, budaya, dan struktur organisasi yang dapat hidup dimana saja. Henry Fayol, F.W. Taylor, serta Gulick dan Urwick merupakan tokoh besar dalam perkembangan paradigma kedua ini.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada masa ini administrasi negara mengalami krisis dikarenakan kembali bertemu dengan Ilmu Politik yang mengakibatkan perdebatan terkait dikotomi administrasi dan politik berdasarkan kritik dari Simon. Usaha dalam memperbaiki keterkaitan konseptual antara administrasi dan politik mengakibatkan perubahan lokus yaitu birokrasi pemerintahan. Perkembangan baru administrasi negara terjadi pada masa ini dengan munculnya studi perbandingan dan pembangunan administrasi yang merupakan bagian dari administrasi negara.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada masa ini administrasi publik membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen yang dikembangkan dengan cara ilmiah. Ilmu administrasi publik menyajikan suatu fokus, bukan lokus. Fokus yang dibahas secara mendalam pada masa ini meliputi perilaku organisasi, analisis manajemen, penerapan teknologi yang modern, analisis terhadap sistem riset operasi. Lokus dari ilmu administrasi publik dengan berbagai fokus tersebut masih belum jelas dikarenakan aspek dari prinsip-prinsip manajemen tersebut dapat diterapkan di dunia bisnis.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970)

Para paradigma ini membahas mengenai dua perspektif yang perlu ditingkatkan dalam administrasi negara yaitu ahli administrasi negara yang lebih berminat pada permasalahan kebijakan publik. Administrasi negara lebih menitikberatkan pada ilmu politik dan pengukuran hasil dari penerapan kebijakan. Fokus dari paradigma ini adalah teori organisasi, kebijakan publik, dan proses administrasi atau manajemen, sedangkan lokusnya pada birokrasi pemerintahan dan masalah publik.

6. *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma ini dikenal sebagai paradigma *governance*, muncul pada akhir tahun 1990-an. *Governance*, menurut Tamagoya (Ikeanyibe,

2017), dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh para pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara atau rakyatnya. Ini adalah proses kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan kebijakan publik, dan mengumumkan keputusan yang secara langsung mempengaruhi manusia dan institusi. Paradigma *governance* memiliki keterkaitan erat dengan *New Public Management* (NPM); menurut Peters (Ikeanyibe, 2017), keduanya memiliki persamaan karena keduanya berusaha mengatasi sistem pemerintahan hierarki dan top-down yang ada di masa lalu. Meski demikian, Peters juga menyoroti perbedaan antara NPM dan *governance*. Dalam NPM, penggunaan aktor non-pemerintah dimaksudkan untuk mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, dan membatasi kekuatan negara, sedangkan pada pendekatan *governance*, efisiensi tetap menjadi unsur penting, tetapi pembenaran utamanya adalah untuk melibatkan masyarakat sipil, meningkatkan partisipasi, dan mengakui kapasitas jaringan dalam masyarakat sipil untuk memberikan tingkat pengelolaan diri di bidang kebijakan mereka.

Menurut Gibson, *governance* pada dasarnya melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini mencakup penduduk lokal, organisasi yang melayani masyarakat/daerah, sektor publik, dan sektor swasta (Ikeanyibe, 2017). Stoker (Ikeanyibe, 2017) mengajukan lima prinsip kritis dan dilematis yang sebagian besar telah menjadi dasar paradigma *governance*:

- 1) Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan di luar pemerintah.
- 2) Kabur batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi.
- 3) Ketergantungan kekuasaan di antara institusi yang terlibat.
- 4) Jaringan aktor pemerintah yang mandiri dan otonom.
- 5) Dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah, tidak bergantung pada kekuatan pemerintah untuk menggunakan wewenangnya.

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya ditujukan untuk optimalisasi fungsi pelayanan publik melalui praktek administrasi yang efektif. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan tidak hanya pemerintah atau negara saja, melainkan juga memerlukan praktik administrasi publik yang baik. Dalam kasus Desa Wisata Bangsri, pendekatan *governance* menegaskan bahwa pengelolaan desa wisata tidak bisa hanya dikerjakan oleh birokrasi desa. Dibutuhkan jaringan kerjasama dengan masyarakat lokal, pelaku usaha, komunitas budaya, hingga perguruan tinggi. Inilah yang menjadi dasar transisi ke pembahasan *collaborative governance*.

1.1.5.3 Manajemen Publik

Perkembangan ilmu administrasi publik saat ini mendorong pada proses pergeseran paradigma dikarenakan penyesuaian dari permasalahan yang sedang terjadi. Adanya beberapa dimensi dalam administrasi publik seperti dimensi lingkungan, dimensi kebijakan, dimensi manajemen, dimensi moral/ etika, dimensi organisasi, dan dimensi kinerja (Keban,

2019). Dimensi manajemen merupakan dimensi yang terdapat dalam ilmu administrasi publik. Manajemen adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang ditentukan sebelumnya dan bermanfaat bagi orang lain (Husaini & Fitria, 2019).

Menurut Overman (1984), manajemen publik merupakan suatu studi lintas disiplin dalam konteks organisasi, yang menggabungkan elemen-elemen perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen. Ott, Hyde, dan Shafritz (1990) mengartikan manajemen publik sebagai usaha untuk memusatkan perhatian pada cara organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik yang telah disepakati bersama. Menurut Donovan dan Jackson (1991:11-12), manajemen publik diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan beragam keterampilan.

Shafritz dan Russel (Keban, 2008) mendefinisikan manajemen publik sebagai usaha individu untuk mengambil tanggung jawab dalam mengelola organisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, baik berupa tenaga kerja maupun mesin, guna mencapai tujuan organisasi. Pada dasarnya, manajemen publik berkaitan dengan pengelolaan instansi pemerintah. Overman (Keban, 2008) menyatakan bahwa meskipun terdapat pengaruh dari "scientific management," manajemen publik bukanlah semata-mata "scientific management." Selain itu, manajemen publik juga bukan "policy analysis" atau administrasi publik, melainkan mencerminkan dinamika antara orientasi "rational-instrumental" di satu sisi dan orientasi politik kebijakan di sisi lain. Menurut Nor Ghofur (2014), manajemen

publik dapat diartikan sebagai manajemen yang dilakukan oleh pemerintah, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pelayanan masyarakat.

Manajemen publik adalah sebuah bidang studi interdisipliner yang melibatkan aspek-aspek umum dalam organisasi. Ini melibatkan kombinasi fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian di satu sisi, dengan elemen-elemen sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. Dalam konteks administrasi publik, manajemen publik dan kebijakan publik merupakan dua bidang terpisah. Kebijakan publik mencerminkan sistem otak dan syaraf, sementara manajemen publik melambangkan sistem jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Dengan kata lain, manajemen publik melibatkan proses penggerakan sumber daya manusia dan non-sumber daya manusia sesuai dengan arahan kebijakan publik. Oleh karena itu, peran manajemen publik melibatkan perencanaan dan pengelolaan proses kolaboratif serta implementasi strategi kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks *governance*, manajemen publik berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola kolaborasi antaraktor. Di Desa Wisata Bangsri, kemampuan manajerial menjadi krusial dalam mengoordinasikan peran BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, serta pihak eksternal. Lemahnya aspek manajemen publik (misalnya perencanaan program, pembagian peran, dan pengawasan) terbukti menghambat terwujudnya kolaborasi yang solid.

1.1.5.4 *Collaborative governance*

Collaborative governance sering melibatkan kemitraan formal atau informal antara pemerintah dan pihak-pihak eksternal. Lalu, Manajemen publik berperan dalam mengelola hubungan kemitraan ini, merancang perjanjian kerjasama, dan memastikan bahwa tujuan bersama dicapai. Manajemen publik melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian berbagai proses dalam pemerintahan, termasuk proses pengambilan keputusan. *Collaborative governance* melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi nirlaba, dan masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen publik bertanggung jawab untuk mengelola dan memfasilitasi proses ini.

Satu elemen penting dalam konsep *collaborative governance* adalah unsur "*governance*." Meskipun telah ada banyak penelitian yang mencoba mendefinisikan *governance*, sejauh ini definisinya terbatas pada peran pemerintah, namun belum mencakup secara menyeluruh. Pemerintah pada umumnya dianggap sebagai rezim yang mengatur aturan, hukum, peradilan, dan praktik administratif untuk membatasi, meresepkan, serta mengkoordinasikan penyediaan barang publik. Definisi ini menempatkan pemerintahan pada struktur tradisional dan mencakup lembaga pengambilan keputusan baik yang bersifat publik maupun swasta. Pemerintahan dalam konteks ini merujuk pada peraturan dan membentuk pedoman untuk pengambilan keputusan kolektif (Dewi, 2012:09).

Kolaboratif merespon terhadap perubahan atau pergeseran dalam lingkungan kebijakan. Pergeseran ini dapat berupa peningkatan jumlah pelaku kebijakan, perluasan atau kesulitan dalam mendeteksi isu-isu, keterbatasan kapasitas pemerintah, serta peningkatan peran institusi di luar pemerintah dan kritisnya pemikiran masyarakat. Ketika perubahan semacam itu terjadi, pemerintah harus segera mengatasi atau menyelesaikan isu yang muncul. Meski begitu, pemerintah tetap harus dapat beradaptasi dan mempertahankan relevansinya dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat yang memiliki kepentingan serta terdampak oleh kebijakan atau masalah publik yang ada (Mutiarawati, 2017).

Ansell dan Gash (2012) mengartikan *collaborative governance* sebagai suatu pengaturan di mana satu atau lebih badan publik secara aktif melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan bersifat deliberatif. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan publik, serta mengelola program atau aset publik. Dalam pemahaman Jonathan, kolaborasi diartikan sebagai suatu proses interaksi yang berkelanjutan di antara individu-individu. Dengan demikian, pada dasarnya, kolaborasi merupakan bentuk interaksi, kerjasama, dan kompromi antara berbagai elemen terkait, baik itu lembaga, individu, maupun pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghadapi konsekuensi dan manfaat dari interaksi

tersebut. Nilai-nilai yang menjadi dasar bagi proses kolaborasi mencakup kesamaan tujuan, konsensus, motivasi untuk berproses bersama, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang, dan berbasis masyarakat. Konsep kolaborasi digunakan untuk menggambarkan hubungan kerjasama yang terjalin di antara pihak-pihak tertentu. Meskipun banyak definisi yang telah diberikan dengan berbagai sudut pandang, prinsip-prinsip utamanya tetap mencakup kebersamaan, kerjasama, pembagian tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab. Namun, meskipun prinsip-prinsip ini menjadi dasar, kolaborasi sulit untuk didefinisikan secara sederhana karena melibatkan dinamika yang kompleks (Tresiena, 2017).

Pada masa kini, pemerintah diharuskan terlibat dalam proses penyelenggaraan negara yang melibatkan berbagai aktor untuk menangani masalah-masalah publik. Hal ini disebabkan oleh konsep *governance* yang mencakup integrasi antar berbagai sektor dalam suatu negara, di mana negara tidak lagi menjadi dominan dan tidak dapat beroperasi tanpa melibatkan sektor lain seperti lembaga non-pemerintah dan masyarakat. *Collaborative governance* bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan, melainkan hasil dari inisiatif berbagai pihak yang mendorong kerjasama dan koordinasi dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Sebaliknya, Stoker yang dikutip oleh Ansell dan Gash (2012) berpendapat bahwa inti dari definisi *Governance* adalah merujuk pada peraturan dan struktur yang mengarahkan pengambilan keputusan bersama.

Pemahaman ini menekankan bahwa pusat perhatian *governance* adalah pada pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, di mana pemerintahan bukanlah tentang keputusan yang dibuat oleh satu individu, melainkan melibatkan kelompok individu, organisasi, atau sistem organisasi yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan konsep di atas, makna kolaborasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kolaborasi sebagai suatu proses dan kolaborasi sebagai suatu cara atau pendekatan dalam pengelolaan atau kepemimpinan institusional. Dalam konteks ini, berbagai institusi pemerintah, pemerintahan, dan non-pemerintah dapat terlibat sesuai dengan proporsi kepentingan dan tujuan masing-masing. Kolaborasi ini dapat melibatkan hanya institusi pemerintah, LSM lokal, sektor swasta, atau bisa juga melibatkan institusi yang terafiliasi dengan pemerintah yang kemudian bekerja sama dengan LSM lokal yang didukung oleh pemerintah, swasta, LSM, atau pihak donor internasional. Dalam kolaborasi ini, institusi-institusi yang terlibat berpartisipasi secara interaktif dalam pengambilan keputusan bersama, namun tingkat keterlibatan mereka tidak selalu seimbang sesuai dengan fokus masing-masing. Kolaborasi dalam konteks normatif mencakup aspirasi atau tujuan filosofis bagi pemerintah untuk mencapai interaksi yang harmonis dengan mitra atau rekan mereka (Mutiarawati, 2017).

Kolaborasi dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama di antara aktor, organisasi, atau institusi untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai

atau dilakukan secara independen. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah kolaborasi dan kerjasama masih sering digunakan secara bergantian, tanpa upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna di antara keduanya. Secara umum, istilah kerjasama lebih akrab daripada kolaborasi, dan belum ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai paradigma mana yang seharusnya dianut.

Collaborative governance merupakan metode pengelolaan pemerintahan yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan di luar negara. Pendekatan ini didasarkan pada pencapaian kesepakatan dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, dengan tujuan untuk segera melaksanakan kebijakan publik dan program-program publik (Zaenuri, 2016:4).

Dalam kerjasama kolaboratif, konsep hubungan principal-agen tidak berlaku, karena partisipan bekerja sama sebagai mitra sejajar. Dalam konteks ini, setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi tetap mempertahankan otonomi mereka sendiri. Para pihak yang berkolaborasi tidak hanya sebagai prinsipal tetapi juga berperan sebagai agen untuk kepentingan masing-masing. Kerjasama ini terbentuk karena adanya kesamaan visi dan tujuan yang sulit dicapai jika setiap pihak bekerja secara independen (Dwiyanto, 2010:258).

Strategi inovatif dari pemerintah dikenal sebagai pemerintahan kolaboratif atau *collaborative governance*. Jenis tata kelola ini melibatkan para pemangku kepentingan secara bersamaan dalam suatu forum dengan

aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama. Sesuai dengan definisi di atas, *collaborative governance* dapat dijelaskan sebagai suatu sistem pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal. Pendekatan ini berorientasi pada konsensus deliberatif dengan tujuan utama yaitu pembuatan dan implementasi kebijakan publik serta pengelolaan program dan aset publik (Irawan, 2016).

Selain model yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008), terdapat pula model lain yang sering digunakan dalam kajian *collaborative governance*, yaitu model yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012). Model Emerson dan Nabatchi memandang *collaborative governance* sebagai suatu rezim tata kelola kolaboratif (*Collaborative governance Regime* atau CGR) yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action. Komponen-komponen tersebut menjelaskan bagaimana proses kolaborasi dibangun melalui keterlibatan aktor yang berprinsip, pembentukan motivasi dan kepercayaan bersama, serta penguatan kapasitas tindakan kolektif melalui kepemimpinan dan sumber daya yang mendukung. Model ini bersifat lebih sistematis dan struktural, karena tidak hanya menyoroti dinamika hubungan antar aktor, tetapi juga bagaimana kolaborasi tersebut beroperasi dalam sistem pemerintahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Sementara itu, model *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2008) menitikberatkan pada proses interaksi langsung antara aktor publik dan non-publik dalam pengambilan keputusan bersama. Model ini menekankan pentingnya kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan yang memfasilitasi (*facilitative leadership*), dan proses kolaboratif yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen bersama, serta pencapaian hasil kolaboratif. Pendekatan Ansell dan Gash lebih menyoroti dinamika sosial yang terjadi selama proses kolaborasi berlangsung, daripada struktur kelembagaan formalnya.

Jika dibandingkan, model Emerson dan Nabatchi menawarkan kerangka yang lebih konseptual dan sistemik, sedangkan model Ansell dan Gash lebih operasional dan aplikatif untuk memahami proses kolaborasi yang terjadi di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, model Ansell dan Gash dipilih karena dinilai paling relevan untuk menganalisis bagaimana proses kolaborasi antar aktor berlangsung dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Model ini mampu menjelaskan bagaimana kepercayaan, komunikasi, dan peran kepemimpinan berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan kolaborasi antar pihak. Selain itu, pendekatan Ansell dan Gash memberikan kerangka yang lebih konkret dalam menelusuri dinamika interaksi antar aktor pemerintah, masyarakat, dan pihak non-pemerintah, sehingga lebih sesuai dengan konteks tata kelola kolaboratif di Indonesia yang bersifat partisipatif, sosial-komunal, dan

bergantung pada relasi kepercayaan. Oleh karena itu, model Ansell dan Gash dianggap paling tepat untuk digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini karena mampu memberikan penjelasan yang mendalam tentang proses, tantangan, serta faktor-faktor penentu keberhasilan *collaborative governance* di tingkat implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan berbagai pandangan ahli, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* merupakan langkah strategis dan responsif pemerintah dalam menangani masalah-masalah publik, mengelola tata kelola pemerintahan, dan melaksanakan program-program pemerintahan. Pemerintah diharapkan untuk terlibat dalam kerjasama dan kemitraan yang lebih luas dengan masyarakat dan instansi swasta karena kompleksitas program/kegiatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam hal lain Ansell dan Gash juga membuat peta atau indikator untuk menentukan proses kolaborasi seperti adanya *face to face dialogue* (dialog tatap muka), *trust building* (menciptakan kepercayaan aktor), *Commitment to Process* (menekankan kepada komitmen bersama), *share understanding* (membangun sebuah pemahaman bersama), dan *Intermediate Outcomes* (hasil sementara) (Ansell & Gash, 2008).

1. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Dimensi ini menekankan pentingnya interaksi langsung antar pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi yang efektif serta memperkuat kesepahaman bersama. Dalam proses *collaborative governance*, *face to face dialogue* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Frekuensi Pertemuan Tatap Muka, mencakup intensitas pertemuan tatap muka yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kesinambungan proses dialog;
- b. Partisipasi Aktif Para Pemangku Kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta), melibatkan tingkat keterlibatan para aktor, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta, dalam diskusi yang berlangsung;
- c. Relevansi Topik, mencakup kesesuaian isu atau agenda yang dibahas dengan kepentingan pengembangan desa wisata;
- d. Peran Fasilitator atau Moderator, melibatkan keberadaan pihak yang mampu mengarahkan dialog agar berjalan efektif, inklusif, dan tidak menyimpang dari tujuan utama.

2. *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Dimensi ini mengacu pada proses membangun rasa saling percaya antar aktor yang terlibat sebagai fondasi utama keberhasilan kolaborasi. Dalam proses *collaborative governance*, *trust building* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Kejujuran dalam Komunikasi, mencakup keterbukaan informasi dan transparansi antar pihak;
- b. Pengalaman Positif Kolaborasi Sebelumnya, melibatkan riwayat keberhasilan kerja sama yang dapat memperkuat kepercayaan;

- c. Kesiediaan Berbagi Informasi dan Sumber Daya, mencakup kemauan aktor untuk memberikan kontribusi nyata dalam bentuk informasi, pengetahuan, maupun sumber daya material;
- d. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa, melibatkan tingkat legitimasi dan penerimaan masyarakat atas peran pemerintah dalam mengelola desa wisata.

3. *Commitment to Process* (Komitmen.terhadap.proses)

Dimensi ini menekankan konsistensi dan keseriusan para pemangku kepentingan dalam mengikuti serta mempertahankan proses kolaborasi. Dalam proses *collaborative governance*, *Commitment to Process* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Kehadiran Rutin, mencakup konsistensi aktor dalam menghadiri pertemuan yang telah disepakati;
- b. Penyelesaian Tugas dan Tanggung Jawab, melibatkan pemenuhan kewajiban sesuai dengan kesepakatan kolaboratif;
- c. Keberlanjutan Dukungan Sumber Daya, mencakup komitmen dalam menyediakan dukungan finansial maupun non-finansial secara berkelanjutan;
- d. Penyelesaian Konflik secara Kolaboratif, melibatkan kemampuan aktor menyelesaikan perbedaan tanpa mengabaikan atau menghentikan proses kolaborasi.

4. *Share Understanding* (Pemahaman bersama)

Dimensi ini menekankan pentingnya kesepahaman dan kesepakatan antar aktor dalam mencapai tujuan bersama. Dalam proses *collaborative governance*, *trust building* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Kesamaan Pandangan terhadap Visi Desa Wisata, mencakup adanya orientasi tujuan yang seragam dalam pengembangan desa wisata;
- b. Dokumen Bersama, melibatkan keberadaan rencana kerja, nota kesepahaman (MoU), atau bentuk dokumen resmi lain sebagai acuan kolaborasi;
- c. Kesepakatan dalam Pengambilan Keputusan, mencakup mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan disepakati bersama;
- d. Transparansi Informasi, melibatkan keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan, kendala, maupun hasil dari setiap proses kolaboratif.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Dimensi ini mengacu pada capaian awal yang menjadi indikator keberlangsungan kolaborasi dan tolok ukur keberhasilan jangka pendek. Dalam proses *collaborative governance*, *Intermediate Outcomes* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Realisasi Program Awal, mencakup pelaksanaan kegiatan atau proyek dasar seperti pelatihan masyarakat atau pembangunan infrastruktur pendukung;

- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat, melibatkan persepsi positif masyarakat terhadap hasil yang telah dicapai;
- c. Peningkatan Jumlah Pengunjung, mencakup perubahan kuantitatif yang menunjukkan dampak nyata dari kolaborasi;
- d. Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Wisata, melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam mengelola dan mengembangkan atraksi wisata.

Dengan kerangka ini, *collaborative governance* menjadi lensa analisis utama untuk melihat bagaimana koordinasi antaraktor di Bangsri masih menghadapi kendala, mulai dari keterbatasan kapasitas pengelola, lemahnya dukungan sektor swasta, hingga belum adanya kerjasama dengan perguruan tinggi maupun integrasi dengan desa wisata lain di Blora.

1.1.5.5 *Best Practices* dalam Tata Kelola Publik

Konsep *Best Practices* dalam administrasi publik merujuk pada praktik kebijakan, program, atau tata kelola yang terbukti efektif, inovatif, berkelanjutan, serta memiliki potensi untuk direplikasi dalam konteks lain. Istilah ini tidak hanya merujuk pada praktik yang berhasil, tetapi pada praktik yang memiliki konfigurasi sistemik, berbasis bukti empiris, dan mampu memberikan dampak yang terukur.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan ditandai oleh beberapa karakteristik utama, yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya,

serta berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menekankan bahwa suatu praktik dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila memenuhi unsur efektivitas kebijakan (*policy effectiveness*), memiliki dampak yang terukur (*measurable impact*), mengandung unsur inovasi kelembagaan, bersifat berkelanjutan (*sustainability*), serta memiliki transferabilitas atau replikabilitas pada konteks lain.

Dengan demikian, *Best Practices* dalam penelitian ini tidak dipahami sekadar sebagai praktik yang menghasilkan keberhasilan jangka pendek, melainkan sebagai konfigurasi tata kelola kolaboratif yang memiliki efektivitas nyata, ketahanan kelembagaan, inovasi, serta potensi untuk direplikasi oleh desa wisata lain. Konsep ini menjadi penting untuk membedakan antara praktik kolaborasi yang bersifat insidental dengan praktik kolaborasi yang telah terlembagakan secara sistemik.

Konsep *Best Practices* dalam penelitian ini merujuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Prasjojo (2007:6–7) yang mengutip penilaian UN-Habitat mengenai praktik terbaik sebagai inisiatif yang menghasilkan outstanding contributions dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks tersebut, suatu praktik dapat dikategorikan sebagai *best practice* apabila memenuhi unsur dampak nyata, kemitraan yang efektif,

keberlanjutan sistemik, kepemimpinan yang inspiratif, serta memiliki potensi untuk ditransfer ke daerah lain.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan lima indikator utama untuk menilai praktik *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri sebagai berikut:

1. *Impact* (Dampak)

Best practice harus menunjukkan dampak langsung yang positif, dapat diidentifikasi, dan dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok yang sebelumnya kurang mendapatkan akses terhadap sumber daya pembangunan. Dalam konteks Desa Wisata Bangsri, indikator dampak diukur melalui:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, meliputi bertambahnya pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja baru, serta pertumbuhan UMKM desa sebagai efek langsung dari pengembangan desa wisata;
- b. Perbaikan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Publik, mencakup pembangunan atau peningkatan fasilitas wisata, akses jalan, sarana pendukung, serta layanan publik yang lebih baik;
- c. Peningkatan Partisipasi Sosial, melibatkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisata dan pengambilan keputusan;
- d. Manfaat bagi Kelompok Rentan, mencakup sejauh mana pengembangan desa wisata juga memberikan akses ekonomi bagi kelompok yang sebelumnya kurang beruntung.

2. *Partnership* (Kemitraan)

Sebuah best practice harus dibangun atas dasar kemitraan yang efektif antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat. Minimal terdapat dua atau lebih aktor yang terlibat secara integratif, bukan sekadar koordinatif formal. Dalam penelitian ini, kemitraan dianalisis melalui:

- a. Keterlibatan multi-aktor (pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, dan mitra eksternal) Keterlibatan Multi-Aktor, meliputi partisipasi aktif pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat lokal, dan mitra eksternal;
- b. Pembagian Peran yang Jelas, mencakup adanya distribusi tugas dan tanggung jawab yang terstruktur antar aktor;
- c. Kesamaan Pandangan terhadap Visi Desa Wisata, mencakup adanya orientasi tujuan yang seragam dalam pengembangan desa wisata;
- d. Dokumen Bersama, melibatkan keberadaan rencana kerja, nota kesepahaman (MoU), atau bentuk dokumen resmi lain sebagai acuan kolaborasi;
- e. Kesepakatan dalam Pengambilan Keputusan, mencakup mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif dan disepakati bersama;
- f. Transparansi Informasi, melibatkan keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan, kendala, maupun hasil dari setiap proses kolaboratif.

3. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Keberlanjutan mengacu pada kemampuan praktik kolaboratif untuk bertahan dalam jangka panjang melalui perubahan mendasar pada aspek kebijakan, kerangka institusional, manajemen, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, keberlanjutan dilihat dari:

- a. Kelembagaan yang Terstruktur, meliputi adanya struktur organisasi yang jelas dan berjalan secara konsisten;
- b. Landasan Regulasi atau Kebijakan Formal, mencakup peraturan desa atau kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata;
- c. Manajemen yang Transparan dan Akuntabel, melibatkan sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan yang terbuka;
- d. Ketahanan terhadap Perubahan Kepemimpinan, mencakup kemampuan sistem tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepala desa atau pengurus;
- e. Keberlanjutan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan, meliputi upaya menjaga nilai lokal, keberlanjutan ekonomi, serta kelestarian lingkungan.

4. *Leadership* (Kepemimpinan)

Best practice harus digerakkan oleh kepemimpinan yang mampu menginspirasi tindakan kolektif, membangun kepercayaan, serta mendorong perubahan kebijakan yang progresif. Dalam penelitian ini, kepemimpinan dianalisis melalui:

- a. Kepemimpinan Fasilitatif, mencakup kemampuan pemimpin dalam menjembatani kepentingan berbagai aktor;
- b. Kemampuan Membangun Kepercayaan (*Trust Building*), melibatkan konsistensi tindakan, komunikasi terbuka, dan pengalaman kolektif yang membangun rasa saling percaya;
- c. Kemampuan Mengelola Konflik, mencakup penyelesaian perbedaan kepentingan secara musyawarah;
- d. Kemampuan Mendorong Inovasi, meliputi dorongan terhadap ide-ide baru dalam pengembangan desa wisata;
- e. Visi Transformasional, mencakup kemampuan pemimpin dalam membangun arah jangka panjang desa wisata.

5. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas menunjukkan bahwa praktik yang dikembangkan memiliki potensi untuk direplikasi atau diadaptasi oleh daerah lain. Indikator ini dianalisis melalui:

- a. Model Pengelolaan yang Terdokumentasi, meliputi adanya dokumentasi sistem, prosedur, dan pembelajaran;
- b. Struktur yang Mudah Diadaptasi, mencakup fleksibilitas model untuk diterapkan di desa lain dengan karakteristik berbeda;
- c. Pengakuan atau Benchmarking Eksternal, melibatkan adanya studi banding, penghargaan, atau ketertarikan daerah lain untuk mereplikasi praktik tersebut;

- d. Relevansi Kontekstual, mencakup kesesuaian model dengan prinsip-prinsip umum tata kelola desa wisata yang dapat diterapkan secara luas.

1.1.5.6 *Triple Helix* dalam Pengembangan Desa Wisata

Konsep *Triple Helix* merupakan salah satu pendekatan yang menjelaskan pentingnya kolaborasi antaraktor dalam mendukung pembangunan dan inovasi. Pada awalnya, konsep *Triple Helix* dikembangkan untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam menciptakan inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, seiring perkembangan kajian tata kelola dan pembangunan daerah, konsep tersebut mengalami berbagai modifikasi sesuai dengan konteks penelitian dan kebutuhan di lapangan. Dalam pengembangan desa wisata, keberhasilan suatu destinasi tidak hanya ditentukan oleh potensi wisata yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi tersebut secara berkelanjutan.

Pengembangan desa wisata merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan, sumber daya, serta tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme kolaborasi yang mampu mengintegrasikan peran berbagai pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks Desa Wisata Bangsri, pengembangan wisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama

serta dunia usaha yang mendukung kegiatan ekonomi dan pengelolaan wisata. Dengan demikian, model *Triple Helix* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga aktor utama, yaitu *government*, *business*, dan *community*.

Aktor *government* mencakup Pemerintah Desa Bangsri, Pemerintah Kabupaten Blora, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan fasilitas, pendampingan, dan dukungan program pengembangan desa wisata. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator yang memastikan bahwa seluruh kegiatan pengembangan wisata berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan pembangunan daerah.

Aktor *business* meliputi BUMDes, pelaku UMKM, pengelola usaha wisata, serta berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi desa wisata. Peran dunia usaha sangat penting dalam menciptakan nilai ekonomi dari potensi wisata yang dimiliki desa. Selain itu, sektor usaha juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan finansial pengelolaan desa wisata.

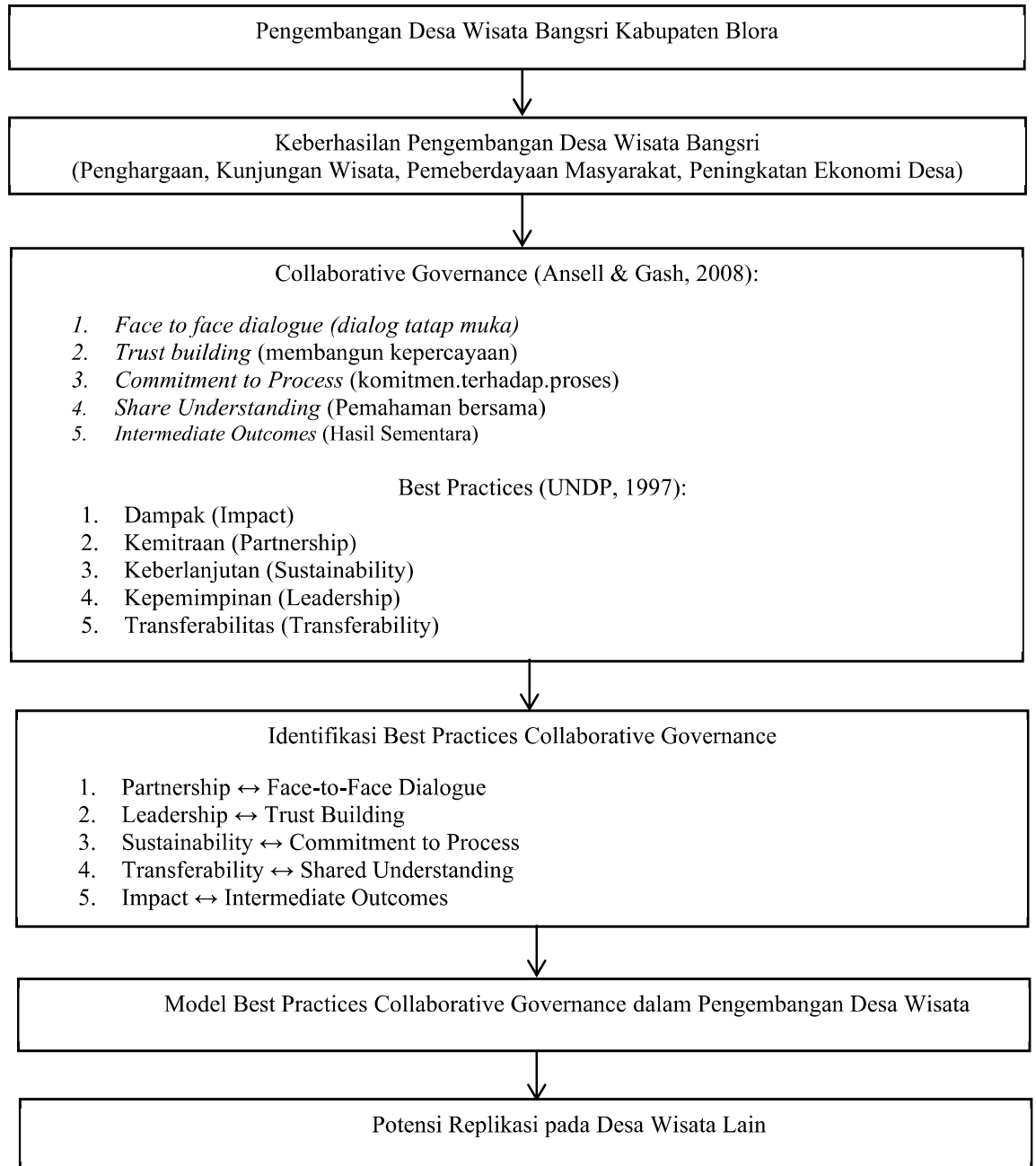
Sementara itu, aktor *community* terdiri atas Pokdarwis, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, serta warga Desa Bangsri secara umum. Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam

menjaga keberlanjutan program wisata, melestarikan potensi lokal, serta menciptakan suasana wisata yang berbasis pada karakteristik dan kearifan lokal desa.

Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Pemerintah menyediakan regulasi dan dukungan kebijakan, dunia usaha menggerakkan aktivitas ekonomi dan pengelolaan wisata, sedangkan masyarakat berperan sebagai pelaku utama yang menjalankan berbagai kegiatan wisata di tingkat lokal. Hubungan yang sinergis di antara ketiga aktor tersebut menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, konsep *Triple Helix* tidak digunakan sebagai teori utama untuk menganalisis proses kolaborasi, melainkan digunakan sebagai kerangka untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri. Adapun analisis mengenai bagaimana hubungan dan interaksi antaraktor tersebut berlangsung dilakukan menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Dengan demikian, Triple Helix berfungsi untuk menjelaskan siapa saja pihak yang terlibat dalam kolaborasi, sedangkan Collaborative Governance digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses kolaborasi tersebut berlangsung hingga menghasilkan praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri.

1.1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Operasionalisasi Konsep

1.1.7 Proses *Collaborative Governance*

Proses *collaborative governance* di Desa Bangsri, Kabupaten Blora merupakan budaya yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang melibatkan masyarakat desa, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pihak swasta, yang mana bertujuan untuk pengembangan pariwisata di Desa Bangsri, Kabupaten Blora dan dapat diukur menggunakan fenomena sebagai berikut:

1. *Face to face dialogue* (Dialog tatap muka)

Dimensi ini menekankan pentingnya interaksi langsung antar pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi yang efektif serta memperkuat kesepahaman bersama dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri. Dalam proses *collaborative governance*, *face to face dialogue* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Frekuensi Pertemuan, menunjukkan seberapa intens para pemangku kepentingan melakukan interaksi langsung secara rutin guna menjaga kesinambungan komunikasi dan koordinasi. Dalam konteks Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, frekuensi pertemuan ini menjadi indikator penting untuk melihat konsistensi forum diskusi yang mempertemukan pemerintah desa, pengelola wisata, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam membahas pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.
- b. Partisipasi Aktif, mencerminkan tingkat keterlibatan nyata dari berbagai aktor dalam proses dialog, baik dalam menyampaikan gagasan, memberikan

masuk, maupun terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, partisipasi ini terlihat dari kehadiran dan kontribusi pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), masyarakat lokal, serta pihak swasta dalam setiap forum diskusi yang diselenggarakan.

- c. Relevansi Topik Diskusi. Relevansi topik mengacu pada kesesuaian isu yang dibahas dalam forum dialog dengan kebutuhan dan prioritas pengembangan desa wisata. Pada Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, topik yang relevan mencakup pengembangan atraksi wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, promosi digital, serta pengelolaan fasilitas pendukung yang secara langsung berdampak pada kemajuan desa wisata.
- d. Peran Fasilitator atau Moderator, sangat penting dalam mengarahkan jalannya diskusi agar tetap fokus, inklusif, dan produktif. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, keberadaan pihak yang mampu memfasilitasi dialog, baik dari pemerintah desa maupun tokoh masyarakat, menjadi kunci dalam memastikan setiap aktor memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan menjaga arah pembahasan tetap sesuai tujuan.

2. *Trust building* (Membangun kepercayaan)

Dimensi ini mengacu pada proses membangun rasa saling percaya antar aktor sebagai fondasi utama keberhasilan kolaborasi di Desa Wisata Bangsri. Dalam proses *collaborative governance*, *trust building* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Kejujuran dalam Komunikasi, mencerminkan keterbukaan antaraktor dalam menyampaikan informasi, termasuk terkait perencanaan, pelaksanaan,

maupun kendala yang dihadapi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, transparansi ini menjadi dasar penting untuk membangun hubungan yang saling percaya antar pemerintah desa, masyarakat, dan pihak lain yang terlibat.

- b. Pengalaman Kolaborasi Sebelumnya, pengalaman keberhasilan kerja sama di masa lalu dapat memperkuat rasa percaya antaraktor dalam melanjutkan kolaborasi. Pada Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, pengalaman positif seperti keberhasilan penyelenggaraan kegiatan wisata atau program pemberdayaan masyarakat menjadi modal sosial yang memperkuat kepercayaan dalam kolaborasi berikutnya.
- c. Kesiediaan Berbagi Informasi dan Sumber Daya, mencerminkan komitmen aktor dalam mendukung kolaborasi melalui kontribusi nyata, baik berupa informasi, pengetahuan, tenaga, maupun sumber daya finansial. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan desa wisata secara bersama-sama.
- d. Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa, menunjukkan tingkat legitimasi kepemimpinan dalam mengelola desa wisata. Dalam konteks Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, tingkat kepercayaan ini mempengaruhi sejauh mana masyarakat bersedia terlibat aktif dan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah desa.

3. *Commitment to Process* (Komitmen terhadap proses)

Dimensi ini menekankan konsistensi dan keseriusan pemangku kepentingan dalam mempertahankan proses kolaborasi pada pengembangan

Desa Wisata Bangsri. Dalam proses *collaborative governance*, *Commitment to Process* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Kehadiran Rutin, mencerminkan konsistensi aktor dalam mengikuti setiap tahapan proses kolaborasi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, kehadiran yang berkelanjutan dalam forum pertemuan menunjukkan keseriusan para pihak dalam mendukung pengembangan desa wisata.
- b. Penyelesaian Tugas dan Tanggung Jawab, mengacu pada kemampuan aktor dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai kesepakatan. Pada Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini terlihat dari implementasi program kerja yang telah direncanakan bersama.
- c. Keberlanjutan Dukungan Sumber Daya, dimensi ini mencerminkan komitmen dalam menyediakan dukungan sumber daya secara berkelanjutan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, dukungan tersebut dapat berupa pendanaan, tenaga kerja, maupun fasilitas yang menunjang pengembangan wisata.
- d. Penyelesaian Konflik secara Kolaboratif, kemampuan menyelesaikan konflik secara bersama menjadi indikator penting dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dan dialog tanpa mengganggu proses kolaboratif yang telah berjalan.

4. *Share Understanding* (Pemahaman bersama)

Dimensi ini menekankan pentingnya adanya kesepahaman antaraktor dalam mencapai tujuan bersama pengembangan Desa Wisata Bangsri. Dalam

proses *collaborative governance*, *trust building* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Kesamaan Pandangan terhadap Visi Desa Wisata, menunjukkan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai oleh seluruh aktor. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, kesepakatan ini menjadi dasar dalam menyusun arah pengembangan desa wisata.
- b. Dokumen Bersama, seperti rencana kerja atau MoU menjadi acuan dalam menjalankan kolaborasi. Pada Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, keberadaan dokumen ini memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- c. Kesepakatan dalam Pengambilan Keputusan, mencerminkan proses yang inklusif dan partisipatif. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, keputusan diambil melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.
- d. Transparansi Informasi, menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan dan hasil kegiatan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

5. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara)

Dimensi ini mengacu pada capaian awal sebagai indikator keberlangsungan kolaborasi di Desa Wisata Bangsri. Dalam proses *collaborative governance*, *Intermediate Outcomes* mencakup kriteria sebagai berikut.

- a. Realisasi Program Awal, menjadi indikator awal keberhasilan kolaborasi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini dapat berupa pelatihan masyarakat, pengembangan atraksi wisata, atau pembangunan fasilitas pendukung.
- b. Tingkat Kepuasan Masyarakat, mencerminkan penerimaan terhadap hasil kolaborasi. Pada Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, tingkat kepuasan ini dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap perkembangan desa wisata.
- c. Peningkatan Jumlah Pengunjung, menjadi indikator kuantitatif keberhasilan kolaborasi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, peningkatan ini menunjukkan dampak nyata dari upaya pengembangan yang dilakukan bersama.
- d. Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Wisata, menunjukkan tingkat partisipasi dalam pengelolaan wisata. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, partisipasi ini terlihat dari peran aktif warga dalam berbagai aktivitas wisata yang dikembangkan.

Hasil analisis terhadap setiap dimensi proses *collaborative governance* tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*Best Practices*) yang berkontribusi terhadap keberhasilan pengembangan Desa Wisata Bangsri.

1.1.8 *Best Practices* dalam Tata Kelola Publik

Konsep *Best Practices* dalam tata kelola publik merujuk pada praktik kebijakan atau tata kelola yang terbukti efektif, inovatif, berkelanjutan, dan

memiliki potensi untuk direplikasi dalam konteks lain. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern (*governance*), praktik terbaik tidak hanya diukur dari keberhasilan output program, tetapi juga dari kualitas proses, kemitraan antaraktor, keberlanjutan kelembagaan, kepemimpinan, serta kemampuan model tersebut untuk diadaptasi di tempat lain.

Merujuk pada kerangka *Best Practices* yang dikembangkan oleh UN-Habitat dan dikontekstualisasikan dalam studi administrasi publik, penelitian ini mengoperasionalkan konsep *Best Practices* ke dalam lima indikator utama, yaitu: (1) Dampak (Impact), (2) Kemitraan (Partnership), (3) Keberlanjutan (Sustainability), (4) Kepemimpinan (Leadership), dan (5) Transferabilitas (Transferability). Kelima indikator ini digunakan untuk menilai apakah praktik *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri dapat dikategorikan sebagai praktik terbaik dalam tata kelola publik.

Dalam menciptakan proses *collaborative governance* yang kuat, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Bangsri, Kabupaten Blora. Berikut ini adalah faktor pendukung dan faktor penghambat proses *collaborative governance*.

1. *Impact* (Dampak)

Dampak dalam konsep *Best Practices* dapat diartikan sebagai perubahan nyata yang dihasilkan dari praktik *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora. Dampak

ini tercermin dalam peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, bertambahnya pendapatan masyarakat, tumbuhnya UMKM lokal, serta perbaikan infrastruktur pendukung wisata. Suatu praktik dikategorikan sebagai best practice apabila manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dalam penelitian ini, *impact* dianalisis melalui:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi, mencerminkan dampak langsung dari pengembangan desa wisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, terbukanya peluang kerja, serta berkembangnya UMKM lokal. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, indikator ini dapat dilihat dari perubahan mata pencaharian masyarakat yang semakin beragam dan bertumpu pada sektor pariwisata.
- b. Perbaikan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Publik, perbaikan ini mengacu pada peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas wisata maupun kebutuhan masyarakat secara umum. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini terlihat dari pembangunan akses jalan, fasilitas wisata, serta layanan publik yang semakin memadai dan menunjang kenyamanan pengunjung.
- c. Peningkatan Partisipasi Sosial, menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan wisata dan proses pengambilan keputusan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten

Blora, peningkatan partisipasi ini tercermin dari keterlibatan warga dalam pengelolaan destinasi, kegiatan event, serta forum musyawarah desa.

- d. Manfaat bagi Kelompok Rentan, sub fenomena ini mengukur sejauh mana pengembangan desa wisata memberikan manfaat bagi kelompok yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan perempuan, lansia, atau kelompok ekonomi lemah dalam aktivitas ekonomi berbasis wisata.

2. *Partnership* (Kemitraan)

Kemitraan dalam *Best Practices* merujuk pada kualitas keterlibatan dan hubungan antaraktor dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri. Kemitraan yang baik memungkinkan pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis, masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta bekerja secara terkoordinasi dengan pembagian peran yang jelas. Pola kemitraan yang efektif tidak hanya ditandai oleh keberadaan kerja sama formal, tetapi juga oleh partisipasi aktif, komunikasi terbuka, serta kontribusi nyata masing-masing aktor dalam mendukung keberhasilan desa wisata. Dalam penelitian ini, *partnership* dianalisis melalui:

- a. Keterlibatan Multi-Aktor, mencerminkan partisipasi berbagai pihak dalam proses kolaborasi, termasuk pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, dan mitra eksternal. Dalam

Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, sinergi antaraktor ini menjadi fondasi utama dalam mengembangkan desa wisata secara integratif.

- b. Pembagian Peran yang Jelas, mengacu pada distribusi tugas dan tanggung jawab yang terstruktur antaraktor sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, kejelasan peran ini penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program wisata.
- c. Kesamaan Pandangan terhadap Visi Desa Wisata, menunjukkan adanya orientasi tujuan yang seragam di antara para pemangku kepentingan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, kesepahaman ini menjadi dasar dalam merancang arah pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.
- d. Dokumen Bersama, seperti rencana kerja atau MoU menjadi pedoman dalam pelaksanaan kolaborasi. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, keberadaan dokumen ini memperkuat legitimasi dan kejelasan arah kerja sama antaraktor.
- e. Kesepakatan dalam Pengambilan Keputusan, mencerminkan proses yang partisipatif dan inklusif. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, mekanisme ini dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.
- f. Transparansi Informasi, menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan, kendala, dan hasil kegiatan. Dalam

Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas antaraktor.

3. *Sustainability* (Keberlanjutan)

Keberlanjutan dalam *Best Practices* dapat diartikan sebagai kemampuan tata kelola Desa Wisata Bangsri untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang, baik secara kelembagaan, finansial, maupun sosial. Praktik kolaboratif dinilai berkelanjutan apabila tidak bergantung sepenuhnya pada momentum sesaat atau figur tertentu, melainkan ditopang oleh sistem kelembagaan yang jelas, pengelolaan keuangan yang transparan, serta regenerasi kapasitas pengelola desa wisata. Dengan demikian, keberhasilan tidak bersifat temporer, tetapi mampu dijaga secara konsisten. Dalam penelitian ini, *sustainability* dianalisis melalui:

- a. Kelembagaan yang Terstruktur, menunjukkan adanya organisasi yang jelas dan berjalan secara konsisten dalam mengelola desa wisata. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini terlihat dari keberadaan struktur organisasi seperti Pokdarwis dan BUMDes yang berfungsi aktif.
- b. Landasan Regulasi atau Kebijakan Formal, mencakup keberadaan aturan formal yang mendukung pengembangan desa wisata. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, regulasi ini dapat berupa peraturan desa yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wisata.

- c. Manajemen yang Transparan dan Akuntabel, mencerminkan sistem pengelolaan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini terlihat dari sistem pelaporan keuangan dan kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat.
 - d. Ketahanan terhadap Perubahan Kepemimpinan, sub fenomena ini menunjukkan kemampuan sistem tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, keberlanjutan program tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan pada sistem yang telah dibangun.
 - e. Keberlanjutan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan, mencakup upaya menjaga keseimbangan antara aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini terlihat dari pelestarian budaya lokal, peningkatan ekonomi masyarakat, serta upaya menjaga kelestarian lingkungan.
4. *Leadership* (Kepemimpinan)

Kepemimpinan dalam konteks *Best Practices* merujuk pada peran aktor kunci dalam memfasilitasi, mengarahkan, dan menjaga komitmen kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri. Kepemimpinan yang efektif tercermin dari kemampuan membangun visi bersama, menyatukan berbagai kepentingan, serta menyelesaikan konflik secara deliberatif. Praktik tata kelola dapat dikategorikan sebagai best practice

apabila kepemimpinan yang berjalan bersifat fasilitatif dan inklusif, bukan dominatif, serta mampu mendorong partisipasi kolektif seluruh pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, *leadership* dianalisis melalui:

- a. Kepemimpinan fasilitatif, mencerminkan kemampuan pemimpin dalam menjembatani berbagai kepentingan aktor. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, pemimpin berperan sebagai mediator yang mampu mengakomodasi aspirasi semua pihak.
- b. Kemampuan Membangun Kepercayaan, kemampuan ini terlihat dari konsistensi tindakan dan komunikasi terbuka yang membangun rasa saling percaya. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, kepercayaan menjadi modal utama dalam menjaga keberlanjutan kolaborasi.
- c. Kemampuan Mengelola Konflik, mencakup penyelesaian perbedaan secara musyawarah. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, konflik diselesaikan melalui pendekatan dialogis tanpa merusak hubungan antaraktor.
- d. Kemampuan Mendorong Inovasi, menunjukkan kemampuan pemimpin dalam mendorong ide-ide baru. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, inovasi dapat berupa pengembangan atraksi wisata, promosi digital, atau program kreatif lainnya.
- e. Visi Transformasional, mencerminkan kemampuan pemimpin dalam membangun arah jangka panjang. Dalam Desa Wisata

Bangsri, Kabupaten Blora, visi ini menjadi pedoman dalam mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan.

5. *Transferability* (Transferabilitas)

Transferabilitas dalam *Best Practices* diartikan sebagai potensi praktik tata kelola Desa Wisata Bangsri untuk direplikasi atau diadaptasi oleh desa wisata lain dengan penyesuaian kontekstual. Suatu praktik memiliki nilai transferabilitas apabila model kelembagaan, pola kemitraan, serta mekanisme kolaborasi yang diterapkan dapat didokumentasikan secara jelas dan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi unik tertentu. Dengan demikian, pengalaman Bangsri dapat menjadi referensi pembelajaran bagi desa lain dalam mengembangkan tata kelola wisata berbasis kolaborasi. Dalam penelitian ini, *transferability* dianalisis melalui:

- a. Model Pengelolaan yang Terdokumentasi, menunjukkan adanya pencatatan sistematis terhadap praktik yang dilakukan. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, dokumentasi ini menjadi sumber pembelajaran bagi pihak lain.
- b. Struktur yang Mudah Diadaptasi, menunjukkan fleksibilitas model untuk diterapkan di konteks lain. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, praktik kolaboratif yang ada memiliki potensi untuk disesuaikan dengan kondisi desa lain.
- c. Pengakuan atau Benchmarking Eksternal, mencerminkan adanya apresiasi atau ketertarikan dari pihak luar. Dalam Desa Wisata

Bangsri, Kabupaten Blora, hal ini dapat berupa kunjungan studi banding atau penghargaan.

- d. Relevansi Kontekstual, menunjukkan kesesuaian praktik dengan prinsip umum tata kelola desa wisata. Dalam Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, praktik yang dikembangkan tetap berbasis pada nilai lokal namun memiliki prinsip yang dapat diterapkan secara luas.

1.8 Argumen Penelitian

Pengembangan desa wisata sebagai bagian dari pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan akademisi. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dari pariwisata dapat dirasakan secara adil oleh seluruh pihak. Namun, kolaborasi tersebut sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya komunikasi yang efektif, rendahnya tingkat kepercayaan antarpihak, serta minimnya komitmen terhadap proses pengembangan.

Dalam konteks Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora, pengembangan potensi wisata desa memerlukan pendekatan yang melibatkan banyak pihak untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, meningkatkan daya tarik wisata, serta memaksimalkan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Proses *collaborative governance* menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antarpihak dalam mewujudkan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan.

Penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan Desa Wisata Bangsri tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan multiaktor, tetapi oleh konfigurasi praktik-praktik kolaboratif tertentu yang memenuhi indikator *collaborative governance* dan membentuk *Best Practices* yang kontekstual serta adaptif.

Dengan kata lain, keberhasilan tersebut tidak semata-mata karena adanya forum kolaborasi, tetapi karena bagaimana proses dialog, pembangunan kepercayaan, pembagian peran, kepemimpinan fasilitatif, serta komitmen bersama dijalankan secara konsisten dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya mengidentifikasi praktik konkret yang menjadi faktor kunci keberhasilan, sehingga dapat dipahami apakah praktik tersebut bersifat kontekstual atau memiliki potensi untuk direplikasi pada desa wisata lain.

Argumen ini sekaligus menempatkan penelitian bukan hanya sebagai studi deskriptif mengenai kolaborasi, tetapi sebagai upaya analitis untuk menemukan pola praktik terbaik (*Best Practices*) *collaborative governance* yang berkontribusi terhadap transformasi desa wisata secara berkelanjutan.

Secara lebih tegas, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa proposisi sebagai berikut:

1. Keberhasilan Desa Wisata Bangsri bukan semata-mata disebabkan oleh tingginya partisipasi masyarakat, tetapi oleh desain kelembagaan kolaboratif yang adaptif dan terstruktur.

2. *Trust building* yang dibangun melalui pengalaman kolektif, dialog berulang, dan distribusi manfaat yang relatif adil menjadi determinan utama keberlanjutan kolaborasi.
3. Praktik kolaboratif yang memenuhi indikator dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan, dan transferabilitas dapat dikategorikan sebagai *Best Practices collaborative governance*.
4. Tanpa desain kelembagaan yang kuat dan pembagian peran yang proporsional, praktik kolaboratif berpotensi mengalami distorsi akibat konflik kepentingan, elite capture, ketimpangan peran, serta ketergantungan pada figur tertentu.

Dengan perumusan proposisi tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan proses kolaborasi di Desa Wisata Bangsri, tetapi menguji secara analitis determinan keberhasilan dan kualitas praktik kolaboratifnya. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian *collaborative governance* sekaligus kontribusi praktis dalam pengembangan model desa wisata berbasis *Best Practices*.

1.9 Metode Penelitian

1.1.9 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. (Wekke Suardi, 2019) mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang dimiliki lebih

ditampilkan. Proses penelitian meliputi mengajukan pertanyaan dan prosedur penelitian yang bersifat sementara, mengumpulkan kumpulan data, meringkas dan menganalisis, menyusun sebagian data dan kemudian memberikan penjelasan tentang arti data tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses *collaborative governance* serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (*Best Practices*) dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses, dinamika interaksi antaraktor, serta makna yang dibangun oleh para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi.

1.1.10 Fokus Penelitian

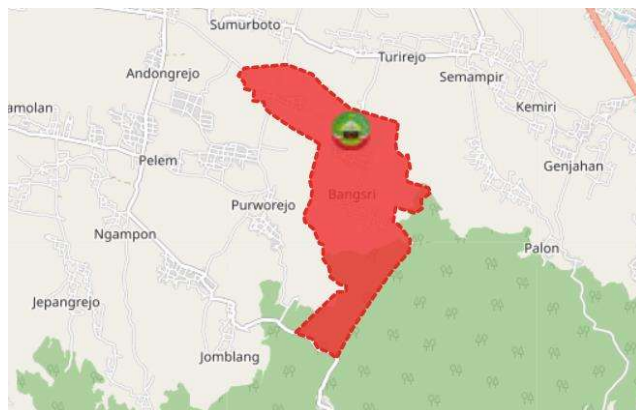
Fokus penelitian ini adalah memberikan batasan studi kualitatif, dalam penelitian kualitatif peneliti menetapkan fokus sebagai pengganti masalah dan didasarkan pada urgensi isu dan fenomena yang terjadi. Spradley dalam (Wekke Suardi, 2019: 43) mengatakan fokus adalah domain yang terkait dengan pendekatan situasi sosial. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengidentifikasi *Best Practices collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri. Adapun fokus penelitian dijabarkan menjadi dua aspek utama, yaitu teori proses *collaborative governance* oleh Ansell dan Gash (2008), yang terdiri dari *face to face dialogue*, *trust building*, *Commitment to Process*, *Shared Understanding*, dan *intermediate outcome*. Selain itu, aspek berikutnya adalah *Best Practices collaborative governance* oleh UN-Habitat yang dikutip oleh

Prasojo (2007), yang terdiri dari *impact*, *partnership*, *sustainability*, *leadership*, dan *transferability*. Kedua aspek ini dilihat secara konten dan konteks sebagai alat untuk menganalisis proses *collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Bangsri, Kabupaten Blora.

1.1.11 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian berguna untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitiannya terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang terjadi dari objek yang diteliti. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. 3 Peta Wilayah Desa Bangsri



Sumber: Website Resmi Desa Bangsri (2026)

Bangsri merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Wisata Bangsri merupakan desa yang berhasil menunjukkan transformasi signifikan

melalui pendekatan *collaborative governance*, sehingga relevan untuk dikaji sebagai praktik terbaik (*best practice*).

1.1.12 Fenomena Pengamatan

Fenomena pengamatan adalah fakta yang ditemui di lapangan atas dasar permasalahan dan isu terkait *Best Practices collaborative governance* dalam pengembangan pariwisata. Fenomena pengamatan dibagi menjadi Fenomena, Sub Fenomena dan Operasionalisasi. Fenomena merupakan turunan dari tujuan penelitian. Sub Fenomena merupakan turunan dari teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Operasionalisasi merupakan aspek-aspek spesifik yang akan ditinjau lebih dalam di lapangan oleh peneliti. Berikut adalah fenomena pengamatan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 3 Fenomena Pengamatan

Fenomena	Sub Fenomena	Operasionalisasi
<i>Collaborative governance</i>	<i>Face to face dialogue</i> (Dialog Tatap Muka)	1. Frekuensi pertemuan tatap muka 2. Partisipasi aktif para pemangku kepentingan 3. Relevansi topik 4. Peran fasilitator atau moderator
	<i>Trust building</i> (Membangun kepercayaan)	1. Kejujuran dalam komunikasi 2. Pengalaman positif kolaborasi sebelumnya 3. Ketersediaan berbagi informasi dan sumber daya 4. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa
	Commitment to	1. Kehadiran rutin

	Process (Komitmen.terhadap. proses)	2. Penyelesaian tugas dan tanggung jawab 3. Keberlanjutan dukungan sumber daya 4. Penyelesaian konflik secara kolaboratif
	Share Understanding (Pemahaman bersama)	1. Kesamaan pandangan terhadap visi desa wisata 2. Dokumen bersama 3. Kesepakatan dalam pengambilan keputusan 4. Transparansi informasi
	<i>Intermediate Outcomes</i> (Hasil Sementara)	1. Realisasi program awal 2. Tingkat kepuasan masyarakat 3. Peningkatan jumlah pengunjung 4. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas wisata

Sumber: Data diolah Peneliti, 2026

1.1.13 Jenis & Sumber Data

Data adaah semua keterangan yang dijadikan responden, maupun yang berasal dari dokumen, baik dalam bentuk statistik/ dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Data diperoleh dengan nilai satu atau lebih variable dalam sampel. Jenis data yang akan digunakan pada penelitian adalah menggunakan data kualitatif yang meliputi tata letak geografis, objek, data profil dari keseluruhan *stakeholders* yang terlibat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data atau informasi yang berasal dari sumber asli, diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber

data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan perangkat desa dan masyarakat Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

2. Data sekunder adalah data atau informasi yang relevan dan didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya terdiri dari dokumen-dokumen, baik pemerintah maupun swasta. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu

1. Dokumentasi yang digunakan meliputi arsip-arsip dan laporan kegiatan resmi yang ada di Desa Bangsri,
2. Artikel dan informasi melalui jurnal dan internet.
3. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang desa wisata.

1.1.14 Pemilihan Informan

Informan dipilih untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan yang dilakukan dengan Teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan mengetahui bagaimana upaya serta usaha dalam meningkatkan pariwisata Desa Bangsri, Kabupaten Blora. Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/ Posisi	Instansi
1.	Yananta Laga Kusuma	Kepala Desa Bangsri	Desa
2.	Sukarno	Sekretaris Desa	Desa
3.	Yasman	Kaur Keuangan	Desa
4.	Ali Kundori	Ketua BUMDes Maju Mapan	Desa
5.	Ardi Santosa	Pendamping Desa	Desa
6.	Dery Gudha Dharma	Ketua Unit Wisata	Pengelola
7.	Supri	Investor	Pihak Swasta
8.	Gladys	Masyarakat Lokal	Desa

Sumber: Peneliti, 2026

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan orang). Terdiri dari pemerintah ada lima (5) orang, ada satu (1) orang dari pengelola, ada satu (1) orang dari pihak swasta atau investor dan ada satu (1) orang dari masyarakat lokal.

1.1.15 Instrumen Penelitian

Penelitian pada *Best Practices Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bangsri di Kabupaten Blora, instrument utamanya adalah peneliti sendiri, dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari

responden. Selain itu, pedoman observasi yang berisikan pengamatan keadaan ataupun kondisi yang berkaitan dengan *Best Practices collaborative governance* dalam pengembangan desa wisata Bangsri di Kabupaten Blora, serta pedoman dokumentasi yang berisikan data-data yang diperoleh dari peneliti selama penelitian berlangsung. Tujuan dari instrument dalam penelitian ini secara khusus untuk memudahkan penggalan data yang lebih kaya dan mendalam.

1.1.16 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan empat cara, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan sebuah proses interaksi yang terjadi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau sumber informasi yang dilakukan dengan komunikasi langsung. Dimana pewawancara dengan sumber informasi melakukan pertemuan secara tatap muka dan bertanya langsung mengenai objek yang akan diteliti oleh pewawancara (Yusuf, 2017). Wawancara mendalam pada penelitian ini dilakukan kepada kepala Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora sebagai fasilitator utama dalam penerapan proses *collaborative governance* dan para penggerak desa wisata yang ada di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

b. Teknik Observasi

Observasi disebutkan oleh Asyari (1983) merupakan pengamatan yang dilakukan secara khusus pada masalah dalam penelitian dan mendapatkan data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada penelitian yang dilakukan. Observasi penelitian dilaksanakan langsung dengan pengamatan *Best Practices pada collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan yang memungkinkan pengambilan data.

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pencarian data mengenai hal atau variabel yang berbentuk tulisan, gambar, karya monumental seseorang, buku, transkrip, dan majalah yang bersifat stabil dan akurat mengenai situasi dan keadaan sebenarnya sehingga dapat dianalisis secara berulang tanpa adanya perubahan pada hasil penelitian (Samsu, 2017:99). Dokumen yang dibutuhkan yaitu gambar, tulisan, struktur, dan organisasi dan segala yang berhubungan dengan *Best Practices Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bangsri di Kabupaten Blora.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami literatur dari dokumen, arsip-arsip, dan laporan kegiatan resmi yang ada di dinas, pemerintah desa, pihak swasta, maupun

masyarakat yang terlibat dalam *Best Practices collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora serta artikel ataupun informasi dari jurnal.

1.1.17 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan teknik kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain Bodgan dalam Wekke Suardi (2019: 91)

Miles dan Huberman (1984) dalam Wekke Suardi (2019: 93) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing verification*, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menginterpretasikan data atau informasi yang didapat dari catatan lapangan/ observasi serta hasil wawancara mendalam terhadap subjek penelitian atau informan. Mereduksi artinya mencari tema dan pola, menulis dan merangkum catatan di lapangan, memilih hal-hal yang pokok, mengidentifikasi serta memfokuskan yang

penting, hal ini akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.

Pengumpulan data diproses menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball*. *Purposive sampling* adalah teknik dalam menentukan sampel yang digunakan dalam penentuan narasumber berdasarkan pada tujuan dan pertimbangan bahwa narasumber yang dipilih adalah yang memahami permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mempermudah peneliti. *Snowball* sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono, 2016 : 218-219).

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan dengan pengelompokkan atau kategori. Melalui penyajian data, maka akan dapat dengan mudah untuk memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya, tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap lanjutan yang mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan yang sudah ada. Peneliti melihat kembali data yang sudah direduksi guna mempertimbangkan makna dari data yang telah dianalisis dengan implikasinya berdasarkan pertanyaan pada perumusan masalah.

1.1.18 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif berhubungan dengan validitas dan realibitas data hasil penelitian. Validitas data adalah derajat ketetapan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan fenomena sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sedangkan realibilitas data adalah derajat konsistensi atau stabilitas data yang dihasilkan dari penelitian.. Dalam memeriksa keabsahan data-data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Sugiyono (2013:330) dalam Lubis (2020:35) triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Triangulasi Sumber

Dalam triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Peneliti melakukan wawancara mengenai *Best Practices Collaborative governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Bangsri, Kabupaten Blora.